

**REPRESENTASI ISLAM KONSERVATIF DI ACEH
OLEH DEUTSCHE WELLE (DW) PADA FILM DOKUMENTER
BERJUDUL: INDONESIA: DIVERSITY UNDER THREAT
(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)**

(Skripsi)

Oleh

M. ALGIFARI RAMADHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**REPRESENTASI ISLAM KONSERVATIF DI ACEH
OLEH DEUTSCHE WELLE (DW) PADA FILM DOKUMENTER
BERJUDUL: INDONESIA: DIVERSITY UNDER THREAT
(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)**

**Oleh
M. ALGIFARI RAMADHAN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU KOMUNIKASI**

Pada

**Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

REPRESENTASI ISLAM KONSERVATIF DI ACEH OLEH DEUTSCHE WELLE (DW) PADA FILM DOKUMENTER BERJUDUL: INDONESIA: DIVERSITY UNDER THREAT (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)

**Oleh:
M. ALGIFARI RAMADHAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana islam konservatif di Aceh, direpresentasikan oleh DW dalam film dokumenter keluaranya: Indonesia: Diversity Under Threat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian teori semiotika Roland Barthes. Data dalam penelitian ini merupakan dokumentasi dari monolog, dialog dan visul, yang ditampilkan dalam film Indonesia: Diversity Under Threat, yang dianggap merepresentasikan islam konservatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam konservatif di Aceh sering direpresentasika dekat dengan terorisme, hukum cambuk, pemberlakuan hukum syariat dan keberadaan polisi syariat.

Kata kunci : Islam Konservatif, Semiotika, Film Dokumenter

ABSTRAK

***REPRESENTATION OF CONSERVATIVE ISLAM IN ACEH BY
DEUTSCHE WELLE (DW) IN A DOCUMENTARY FILM, INDONESIA:
DIVERSITY UNDER THREAT
(ROLAND BARTHES SEMIOTIC ANALYSIS)***

**By:
M. ALGIFARI RAMADHAN**

The purpose of this research is to find out how conservative Islam in Aceh is represented by DW in his documentary film: Indonesia: Diversity Under Threat. This type of research is qualitative descriptive research, with Roland Barthes' semiotic theory. The data in this study is a documentation of monologues, dialogues and visuals, which are shown in the film Indonesia: Diversity Under Threat, which is considered to represent conservative Islam. The results of the study show that conservative Islam in Aceh is often represented as close to terrorism, the caning law, the application of sharia law and the presence of the sharia police.

Keywords : *Conservative Islam, Semiotic, Documentary Film*

Judul Skripsi : **REPRESENTASI ISLAM KONSERVATIF
DI ACEH OLEH DEUTSCHE WELLE
(DW) PADA FILM DOKUMENTER
BERJUDUL: INDONESIA: DIVERSITY
UNDER THREAT (ANALISIS SEMIOTIKA
ROLAND BARTHES)**

Nama Mahasiswa : **M. Algifari Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716031055**

Jurusan : **Ilmu Komunikasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Nanang Trenggono, M.Si.
NIP. 196212041989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi**

Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.
NIP. 198007282005012001

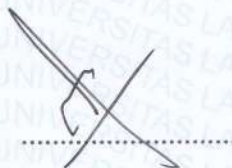
MENGESAHKAN

1. Tim Pengujji

Ketua : **Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**



Pengujji Utama : **Dr. Abdul Firman Ashaf, S.IP., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 November 2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Algifari Ramadhan
NPM : 1716031055
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Alamat Rumah : Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kec, Tegineneng,
Kab, Pesawaran,Lampung
Nomor Telpon : 089632148530

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Representasi Islam Konservatif Di Aceh Oleh Deutsche Welle (Dw) Pada Film Dokumenter Berjudul: Indonesia: Diversity Under Threat (Analisis Semiotika Roland Barthes)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian/skripsi saya, ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak-pihak manapun.

Bandarlampung, 09 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



M. Algifari Ramadhan

NPM: 1716031055

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap M. Algifari Ramadhan. Penulis dilahirkan di Desa Masgar, 02 Januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Yulia Susi Wahyuni. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Margomulyo yang diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Natar diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Natar pada 2017. Serta pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi Luar kampus seperti menjadi anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), dan menjadi Anggota Kelompok Pemuda Anti Narkoba (KOPAN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode Januari-Februari 2020 di Desa Basungan 1, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Universitas Lampung sebagai Jurnalis periode Agustus-Oktober 2020.

MOTTO

If the truth shall kill them, let them die.

- Immanuel Kant

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua saya.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul: Representasi Islam Konservatif Di Aceh Oleh Deutsche Welle (Dw) Pada Film Dokumenter Berjudul: Indonesia: Diversity Under Threat (Analisis Semiotika Roland Barthes) ini dapat selesai, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang banyak berjasa dalam memberikan do'a, bantuan dan semangat kepada penulis, yaitu:

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah-Nya serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.
3. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk sabar membimbing, memberikan penulis banyak ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat, serta saran-saran positif selama penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menjadi dosen penguji serta membantu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.

7. Kedua orang tua penulis Bapak Sudirman dan Ibu Yulia Susi Wahyuni.
8. Teman-teman "ANEH": Dandi Hermawan, Imam Badruzzaman, Fadhil Akrom dan Rahmad Septiyadi. Sampai jumpa dimasa depan, ketika semua sudah merasakan apa itu kebahagiaan.
9. Maria Amelia, dengan tulisannya yang banyak menginspirasi penulis.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung khususnya angkatan 2017 yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
11. Keluarga KKN. Terimakasih sudah menjadi teman selama 40 hari di Basungan.
12. Serta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Bandarlampung, 24 November 2022

Yang membuat pernyataan,

M. Algifari Ramadhan

NPM. 1716031055

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I.PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	8
II.TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Gambaran Umum	14
2.2.1. Gambaran Film Indonesia: Diversity Under Threat	14
2.2.2. Latar Pembuatan Film Indonesia: Diversity Under Threat	15
2.2.3. Profil Film Indonesia: Diversity Under Threat	17
2.2.4. Profil Media	18
2.3. Film Dokumenter	20
2.3.1. Definisi Film Dokumenter	20
2.3.2. Unsur- Unsur Film Dokumenter	21
2.3.3. Sinematografi	24
2.3.4. Tipe Film Dokumenter	25
2.4. Islam Konservatif	28
2.4.1. Pengertian Islam Konservatif	28
2.4.2. Syariat Islam Di Aceh	29

2.5. Inklusivitas	33
2.5.1. Inklusivitas Dalam Sudut Pandang Internasional	33
2.5.2. Inklusivitas Dalam Sudut Pandang Nasional	40
2.6. Konservatif	43
2.7. Representasi	47
2.8. Semiotika	47
2.8.1. Konsep Semiotika	47
2.8.2. Konsep Semiotika Roland Barthes	48
2.8.3. Semiotika Dalam Film	51
III.METODE PENELITIAN	53
3.1. Tipe Penelitian	53
3.2. Metodologi Penelitian	53
3.3. Objek Penelitian	55
3.4. Sumber Data	56
3.5. Teknik Pengumpulan Data	56
3.6. Teknik Analisis Data	57
3.7. Uji Keabsahan Data	59
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian	61
4.2 Pembahasan	118
V. SIMPULAN DAN SARAN	134
5.1 Simpulan	134
5.2 Saran	135

DAFTAR TABEL

Tabel	HALAMAN
1.Inclusiveness Score Global	3
2.Inclusiveness Score Indonesia	4
3.Penelitian Terdahulu	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	HALAMAN
1.Deskripsi Video Youtube Indonesia - Diversity Under Threat	5
2.Bagan Kerangka Pikir	9
3. Thumbnail video youtube Indonesia: Diversity under threat	17
4. logo Deutsche Welle	18
5. Peta Tanda Barthes	54

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Film merupakan sebuah produk budaya, yang sering mewakili kondisi periode masa tertentu, maupun gambaran terkait peristiwa-peristiwa khusus. Seiring dengan berjalanya waktu, akses terhadap film yang awalnya hanya untuk kalangan tertentu, semakin melebar arah segmentasi sosialnya. Film yang awalnya merupakan *high culture* seiring berjalanya waktu berubah menjadi *mass culture*, yang dalam artian menjadi konsumsi masyarakat umum/publik. Karena keluasan segi persebaran pesannya, film dimasukan ke dalam bagian dari media komunikasi massa sekaligus media audio visual karena bentuk pesannya.

Karena pengaruhnya yang besar, tak jarang film menjadi media untuk mentransfer kepentingan-kepentingan politik, hal ini dapat kita lihat dari adanya film *Berdjoeang*, yang memiliki tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia pada Jepang, kala pendudukan Jepang, lalu ada film *G30S PKI*, film yang dibuat oleh rezim Soeharto untuk mentransfer pemahaman kepada masyarakat, terkait pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Ada juga perubahan sosial dan gerakan besar yang disinyalir terinspirasi oleh film, seperti meningkatnya rasisme di Amerika, membesarnya kelompok *Ku Klux Klan*, juga dorongan terhadap pemberlakuan *white supremacy*, yang disinyalir sebagai dampak film *The Birth of a Nation*, 1915 yang disutradarai oleh D. W. Griffith.

Kemampuan yang besar dalam menimbulkan efek, juga kemudahan untuk memperluas khalayak, membuat film tak jarang dijadikan sebagai media untuk men-*counter* pemahaman *mainstream* di tengah masyarakat, contohnya adalah film *Fahrenheit 9/11* yang disutradarai oleh Michael Moore, sebuah film yang menyerang kepemimpinan Presiden George W. Bush dalam era *war of terror*, juga film *The Act of Killing*, yang bisa disebut sebagai *counter* dari film *G30S PKI*.

Kemampuan film dalam memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikator disebabkan oleh adanya identifikasi psikologis yang terjadi, dapat dikatakan identifikasi psikologis dalam menonton film merupakan tahapan *Encoding* dalam skema komunikasi, dalam artian mau tidak mau komunikasi harus melakukan identifikasi psikologis untuk mengetahui pesan dari film. Identifikasi psikologis sendiri merupakan pengalaman psikologis penonton yang membayangkan diri sebagai bagian dari tokoh dalam film, pengalaman psikologis inilah yang berakibat pada besarnya perubahan efek afektif/emosi pada komunikasi/penonton.

Sebagai sebuah hasil karya intelektual, film banyak digunakan sebagai kritik sekaligus tanggapan terhadap realitas sosial. Kebiasaan itu semakin meningkat seiring perkembangan teknologi perfilman juga internet. Perkembangan teknologi membuat proses pembuatan film menjadi singkat dan efisien, lalu internet memberi ruang publikasi kepada film.

DW atau Deutsche Welle, sebagai media penyiaran internasional asal Jerman, ikut menggunakan film sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan sosial yang mencuat, sebagai contoh, DW merilis sebuah seri dokumenter bertema *zero tolerance*, sampai saat ini (10 oktober 2021), total terdapat tiga film dokumenter bertema *zero tolerance* yang sudah diunggah di kanal Youtube DW Documentary. Untuk film pertama berjudul: *Bangladesh – dawn of Islamism* yang diunggah pada, 17 April 2018. Film kedua berjudul: *IS targets the Philippines* yang diunggah pada 9 April 2019. Untuk judul ketiga: *Indonesia: Diversity under threat* yang

diunggah pada 28 Mei 2020. Seri dokumenter ini merupakan bentuk tanggapan DW terhadap naiknya intoleransi yang terindikasi dari turunnya skor inklusivitas global. Seris dokumenter ini di-*realis* berbarengan dengan tahun anjloknya *globa inclusiveness score* yaitu 2018.

Globa inclusiveness score sendiri merupakan skor penilaian global yang disusun oleh The Social Progress Imperative, selaku *supporting* SDGs *program*. Skor ini didapat melalui penilaian indikator-indikator yang dianggap mewakili inklusivitas. *Score* ini merupakan *Score* yang paling dekat dikaitkan dengan tingkat toleransi, adapun data *globa inclusiveness score* yang didapat adalah:

Tabel 1. *Inclusiveness Score Global*

<i>No</i>	<i>Year</i>	<i>Inclusiveness Score</i>	<i>Maximum Inclusiveness Score</i>
1	2017	43.00	100
2	2018	40.17	100
3	2019	41.51	100
4	2020	39.25	100

Sumber : Data diolah dari Executive Summary Social Progress Index 2017, 2018, 2019 dan 2020

Dari data tersebut, kita dapat melihat *trend* turunya *Score Inclusiveness* dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2,83 poin, lalu naik pada tahun 2019 sebesar 1,34 poin, dan kembali turun dengan angka yang cukup tinggi yaitu 2,26 poin pada tahun 2020. Tidak hanya skor inklusivitas global yang mengalami penurunan, skor inklusivitas indonesia juga penurunan tajam pada tahun 2018. Penurunan ini merupakan indikasi dari meningkatnya sikap intoleransi di tengah masyarakat. Adapun data skor *Score Inclusiveness* (Inklusivitas) yang diperoleh adalah:

Tabel 2. *Inclusiveness Score* Indonesia

<i>No</i>	<i>Year</i>	<i>Inclusiveness Score</i>	<i>Max Inclusiveness Score</i>
1	2017	42.17	100
2	2018	40.90	100
3	2019	40.04	100
4	2020	42.98	100

Sumber : Socialprogress.org

Banyak pendapat yang berkembang terkait penggunaan agama sebagai *tool* dalam politik, serta penggunaan politik identitas lah, penyebab isu intoleransi berkembang di Indonesia. Untuk *real* masalah yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya isu intoleransi adalah Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017 kemarin. “Politisasi identitas selama Pilkada DKI Jakarta [2017] berperan dan punya andil dalam menciptakan sikap intoleransi di kalangan masyarakat” (Mahadika dan Sardini, 2019). Setelah Pilkada DKI Jakarta dengan isu intoleransinya mencuat, kita bisa melihat penurunan *score inclusiveness* yang cukup besar pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018.

Berkaitan dengan mencuatnya permasalahan intoleransi di Indonesia, DW membuat sebuah film dokumenter berjudul “Indonesia: Diversity under threat”. DW dalam deskripsi video youtube tersebut menuliskan “*A growing tendency towards a more conservative interpretation of Islam is also noticeable in other parts of secular Indonesia. More women are wearing headscarves in public places. The niqab, the face veil, is becoming increasingly popular. Members of minority groups feel marginalized*” (DW Documentary, 2020). Setelah tulisan tersebut, DW mengutip, Yenni Wahid, selaku perwakilan dari pandangan Islam Liberal “*Unfortunately, Indonesia is not immune to the worldwide increase in intolerance*” (DW Documentary, 2020).

A growing tendency towards a more conservative interpretation of Islam is also noticeable in other parts of secular Indonesia. More women are wearing headscarves in public places. The niqab, the face veil, is becoming increasingly popular. Members of minority groups feel marginalized.

"Unfortunately, Indonesia is not immune to the worldwide increase in intolerance", says politician Yenny Wahid.

Gambar 1. Deskripsi Video Youtube *Indonesia - Diversity Under Threat*

Sumber: Screenshot Via Youtube/DW Documentary

Dari deskripsi yang terdapat di video tersebut, kita bisa melihat bagaimana DW menghubungkan berkembangnya interpretasi Islam secara konservatif dengan naiknya isu intoleransi di Indonesia. Pendapat DW sejalan dengan pendapat Assyaukanie (2018), di mana ia berpendapat, bahwasanya berdasarkan data yang diperoleh beberapa lembaga survei, permasalahan isu intoleransi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, disebabkan oleh gelombang konservatisme yang meningkat yang berakibat pada meningkatkan intoleransi dalam masyarakat Indonesia.

Film dokumenter "Indonesia: Diversity under threat", sendiri merupakan salah satu dari tiga film seri *zero tolerance* keluaran DW. Film tersebut menyorot penerapan Hukum Syariat di Aceh, sekaligus bagaimana kehidupan masyarakat Aceh dibawah penerapan Hukum Syariat. Aceh dipilih sebagai lokasi pembuatan film karena hukum syariah yang dianggap DW sebagai sebuah interpretasi Islam secara konservatif diterapkan sebagai sebuah hukum formal.

Dalam bagian akhir dari deskripsi video youtube tersebut, DW menjelaskan tujuan dari pembuatan film dokumenter itu. "*The documentary "Indonesia - Diversity Under Threat" asks whether the country can preserve its religious tolerance.*" (DW Documentary, 2020). Dari deskripsi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dokumenter tersebut bertujuan untuk menjawab, apakah mungkin praktik toleransi

dalam beragama dapat diselenggarakan? lalu bagaimana peran negara dalam merawat praktik tersebut?

Film sendiri merupakan media untuk mentransfer pesan, dimana didalamnya terdapat muatan sudut pandang dan ideologi dari sang pembuat film. Sebagai media internasional, DW tentu banyak menggunakan sudut pandang internasional ke dalam film dokumenter besutannya. Dengan sudut pandang inilah, pesan-pesan dalam film disusun. Sudut pandang ini, dalam kajian semiotika Barthes dapat disebut sebagai mitos, mitos sendiri merupakan unsur eksternal dari sebuah wacana yang merupakan akar pemaknaan dari sebuah pesan, dalam artian lain mitos merupakan kumpulan hal yang bersatu dan memproduksi makna dari suatu pesan, karenanya mitos sangat erat kaitannya dengan bagaimana sebuah pesan diartikan. Dalam analisis Barthes sendiri mitos merupakan bentuk pemaknaan tahapan kedua yaitu dari *Connotative Signifier* menuju *Connotative signified*

Kondisi sosial masyarakat yang berbeda (mitos) akan menghasilkan *output* pemaknaan yang berbeda pula, hal ini pun terjadi dalam proses pemaknaan dalam film. Film yang dibangun dengan nilai-nilai internasional, akan memiliki pesan yang tersusun berdasarkan nilai tersebut, dan akan lebih mudah di signifikasi oleh orang-orang yang terbiasa hidup dengan nilai-nilai tersebut.

Sebagai film yang menyorot tentang Islam konservatif di Aceh, tentu muatan yang dianggap sebagai Islam yang konservatif merupakan definisi Islam konservatif menurut kacamata DW, sedangkan masyarakat aceh yang hidup dengan nilai-nilai *cultural* Aceh akan memiliki signifikasi yang berbeda dengan signifikasi yang terlahir dari individu yang terbiasa bersentuhan dengan nilai-nilai internasional. Dalam artian mungkin pesan yang ditampilkan oleh DW merupakan representasi dari Islam konservatif dari sudut pandang internasional namun bukan dalam sudut pandang

masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis film tersebut dalam sudut pandang semiotika Roland Barthes, karena dengan menganalisis semiotik dari film tersebut, akan terungkap bagaimana Islam konservatif yang dianggap sebagai alasan meningkatnya intoleransi direpresentasikan oleh DW (Deutsche Welle)

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapat rumusan masalah penelitian berupa: Bagaimana *Deutsche Welle (DW)*, merepresentasikan Islam Konservatif di Aceh, melalui Film Dokumenter Berjudul: Indonesia: *Diversity Under Threat*, dalam analisis Semiotika Roland Barthes?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sekaligus mendeskripsikan, Representasikan Islam Konservatif di Aceh pada Film Dokumenter Berjudul: Indonesia: *Diversity Under Threat* Produksi *Deutsche Welle (DW)* Berdasarkan Analisis Semiotika Roland Barthes.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- 1) **Secara Teoritis**
 - a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah ragam penelitian dalam bidang kajian semiotika.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 2) **Secara Praktis**

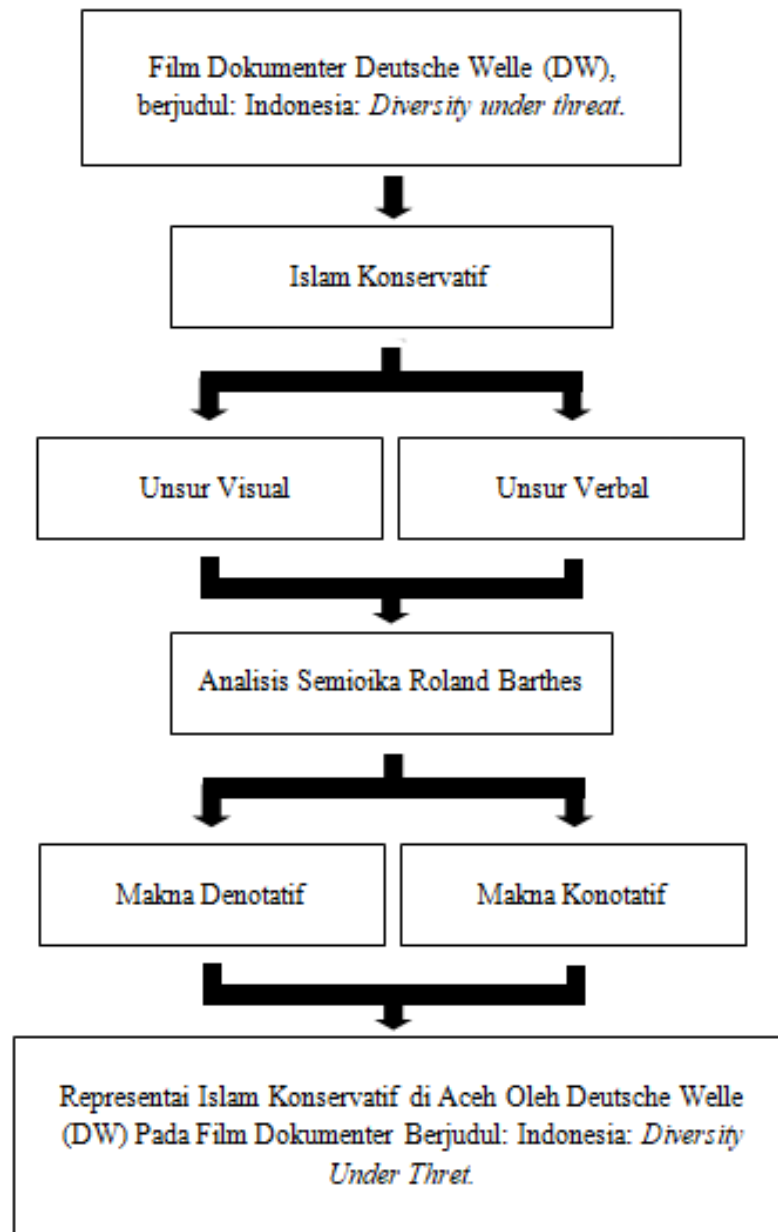
- a. Diharapkan penelitian ini mampu ikut berkontribusi dalam memberikan informasi keilmuan terkait semiotika bagi pembacanya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan signifikasi level pertama dan kedua terkait representasi islam konservatif di Aceh, dalam film dokumenter, Indonesia: *Diversity Under Threat*, keluaran DW. Dalam melakukan signifikasi tersebut, peneliti akan menggunakan cuplikan-cuplikan di dalam film yang terkait dengan representasi islam konservatif di Aceh, baik yang berupa unsur visual maupun unsur verbal.

Islam konservatif sendiri merupakan, “Berbagai aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif, dan cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku” (Bruinessen, 2013; Wahid, 2014).

Setelah unsur-unsur tersebut didapat, akan dianalisis menggunakan model semiotika Roland Barthes, untuk menemukan makna secara denotatif sekaligus konotatif, setelah kedua artian makna tersebut didapat, barulah kesimpulan terkait representasi Islam konservatif di Aceh dalam film dokumenter, Indonesia: *Diversity Under Threat*, keluaran DW bisa diketahui.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh penulis

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga penelitian terdahulu, yang menurut peneliti terdapat korelasi terkait penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama merupakan penelitian milik, Lilia Nur Safitri, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2019, penelitian ini berjudul: Representasi Pustakawan Dalam Anime No Game No Life, dengan metode penelitian Kualitatif, dan menggunakan model semiotika Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini adalah didapat adanya representasi yang berbeda dalam anime tersebut, jika dibandingkan dengan representasi pustakawan biasanya, dimana hal tersebut bisa dilihat dari representasi dari segi penampilan, pustakawan dalam anime tersebut direpresentasikan sebagai wanita yang menarik dan memiliki *sense of style* yang tinggi, berbeda dengan representasi pustakawan yang biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang kaku atau sosok seseorang yang kuper. Didapat juga representasi dari segi perilaku yang memenuhi unsur-unsur ideal dari pustakawan, seperti ramah, berwawasan luas, dan mencintai pengetahuan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anime tersebut merepresentasikan pustakawan sebagai karakter yang baik.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada segi anime sebagai objek yang dianalisis, sedangkan penelitian penulis menganalisis film dokumenter sebagai objek penelitian. Kontribusi yang dapat penulis ambil adalah gambaran terkait teori analisis semiotika Roland Barthes.

Penelitian kedua, merupakan penelitian milik, Nur Afghan Hidayatullah, dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri. Purwokerto tahun 2016. Penelitian ini berjudul Representasi Kekerasan Dalam Film “Jagal“ *The Act Of Killing* (Analisis Semiotik), dengan metode penelitian Kualitatif, dan menggunakan model semiotika John Fiske.

Hasil dari penelitian ini adalah Adanya indikasi ideologi fasisme yang ditampilkan dalam film tersebut, hal ini direpresentasikan dari adegan penyiksaan dan perilaku yang melanggar HAM dalam upaya penumpasan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah perbedaan dari segi model analisis yang digunakan, untuk penelitian yang peneliti lakukan menggunakan model semiotika Barthes, sedangkan Nur Afgan menggunakan model semiotika John Fiske. Kontribusi yang dapat penulis ambil adalah Memberikan gambaran terkait analisis film dokumenter dalam analisis semiotika.

Penelitian ketiga, merupakan penelitian milik Shaela Hani, Universitas Lampung, Lampung, tahun 2015. penelitian ini berjudul: Representasi Pelaku Korupsi Di Indonesia Pada Film Kita *Versus* Korupsi, dengan metode penelitian Kualitatif, dan menggunakan model semiotika Barthes. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya film kita *versus* korupsi memberikan gambaran yang berbeda terhadap pelaku korupsi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak dapat diidentikkan pada ciri fisik ataupun sifat tertentu, penggambaran pelaku korupsi yang identik dengan pejabat hanyalah konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh media massa. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, objek penelitian berupa film pendek, berjumlah empat buah, sedangkan penelitian penulis menggunakan film dokumenter sebagai objek penelitian. Kontribusi yang dapat penulis ambil adalah memberikan

gambaran terkait pengaplikasian teori analisis semiotika Roland Barthes, dalam menganalisis film.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

N O	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN
1	Peneliti	Lilia Nur Safitri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, Jakarta
	Judul	Representasi Pustakawan Dalam Anime No Game No Life
	Metode Penelitian	Kualitatif, Semiotika Roland Barthes.
	Hasil	Didapat adanya representasi yang berbeda dalam anime tersebut, jika dibandingkan dengan representasi pustakawan biasanya, dimana hal tersebut bisa dilihat dari representasi dari segi penampilan, pustakawan dalam anime tersebut direpresentasikan sebagai wanita yang menarik dan memiliki <i>sense of style</i> yang tinggi, berbeda dengan representasi pustakawan yang biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang kaku atau sosok individu yang kuper. Didapat juga representasi dari segi perilaku yang memenuhi unsur-unsur ideal dari pustakawan, seperti ramah, berwawasan luas, dan mencintai pengetahuan, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anime tersebut merepresentasikan pustakawan sebagai karakter yang baik.
	Perbedaan	Penelitian ini dilakukan pada anime sebagai objek yang dianalisis, sedangkan penelitian penulis menganalisis film dokumenter sebagai objek penelitian.
	Kontribusi	Memberikan gambaran terkait teori Semiotika Roland Barthes

2	Peneliti	Nur Fathan Hidayatullah, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (Iain). Purwokerto. 2016
	Judul	Representasi Kekerasan Dalam Film “Jagal“ <i>The Act Of Killing</i> (Analisis Semiotik)
	Metode Penelitian	kualitatif, semiotika John Fiske
	Hasil	Adanya indikasi ideologi fasisme yang ditampilkan dalam film tersebut, hal ini direpresentasikan dari adegan penyiksaan dan perilaku yang melanggar HAM dalam upaya penumpasan simpatisan Partai Komunis Indonesia.
	Perbedaan	Memiliki perbedaan dari segi model analisis yang digunakan, untuk penelitian yang peneliti lakukan menggunakan model semiotika Barthes, sedangkan Nur Afgan menggunakan model semiotika John Fiske
	Kontribusi	Memberikan gambaran terkait film dokumenter dalam analisis semiotika
3	Peneliti	Shaela Hani, Universitas Lampung, Lampung, 2015
	Judul	Representasi Pelaku Korupsi Di Indonesia Pada Film Kita <i>Versus</i> Korupsi
	Metode Penelitian	Kualitatif, Semiotika Roland Barthes.
	Hasil	Bahwasannya film kita versus korupsi memberikan gambaran yang berbeda terhadap pelaku korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak dapat diidentikkan pada ciri fisik ataupun sifat tertentu, penggambaran pelaku korupsi yang identik dengan pejabat hanyalah konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh media massa
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, objek penelitian berupa film pendek, berjumlah empat buah, sedangkan penelitian penulis menggunakan film dokumenter sebagai objek penelitian
	Kontribusi	Memberikan gambaran terkait pengaplikasian teori analisis semiotika Roland Barthes, dalam menganalisis film

2.2. Gambaran Umum

2.2.1. Gambaran Film Indonesia: Diversity Under Threat

Indonesia: Diversity Under Threat, merupakan sebuah film dokumenter yang menyorot tentang bagaimana pengimplementasian hukum syariat di Aceh, sekaligus melihat bagaimana tanggapan masyarakat Aceh terkait dengan penerapan hukum syariat Aceh. Film tersebut berisi berbagai hasil wawancara dengan masyarakat Aceh yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda beda. Film dimulai dengan menayangkan hasil wawancara pendek opini masyarakat tentang penerapan hukum syariat Islam di Aceh. Ada beberapa narasumber yang ditampilkan untuk mewakili pandangan-pandangan masyarakat Aceh tentang penerapan hukum syariat di Aceh, adapun narasumber tersebut yaitu :

- a. Abi Wahid anggota FPI Aceh, sekaligus seorang guru agama, ia menerangkan tentang bagaimana cara hidup seorang muslim yang sesungguhnya sekaligus menerangkan betapa pentingnya untuk menjalankan agama secara *kaffah*.
- b. Raihal Fajri seorang aktivis HAM asal Aceh, ia menerangkan tentang pendapatnya yang kontra dengan penerapan hukum syariat di Aceh.
- c. Balqis Guidotti selaku masyarakat pemilik *resort*, ia menerangkan pandangan kontra terhadap penerapan hukum syariah, ia juga memberikan opininya tentang bagaimana tertekannya perempuan dalam sistem hukum syariah.
- d. Mawardi selaku anggota polisi syariah, ia menjelaskan tentang mekanisme kerja polisi syariah dalam menindak pelanggar.

- e. Indari Mindrayanti *founder of niqab squad*, ia memberikan pandangan tentang masih terbukanya peranan perempuan dalam sistem syariat, dan menyanggah isu yang menyatakan perempuan ditindas di dalam sistem syariah.
- f. Yeni Wahid selaku politisi, ia memberikan pandangan tentang bagaimana islam seharusnya, juga memberikan komentar terkait naiknya isu intoleransi, DW menempatkan Yeni Wahid sebagai perwakilan dari pandangan Islam konservatif.
- g. Abidah Naqiya, selaku pelajar, ia memberikan pandangan kontranya terhadap sistem syariah, ia menganggap sistem syariah yang diterapkan di Aceh berlawanan dengan sistem demokrasi.

2.2.2. Latar Belakang Pembuatan Film Indonesia: Diversity Under Threat

Meningkatnya isu intoleransi secara global menjadi latar belakang pembuatan film tersebut. Dalam hal ini DW membuat sebuah seri khusus bertema *zero tolerance*, di mana Indonesia: Diversity Under Threat, masuk ke dalamnya. Untuk isu yang diangkat, kebanyakan merupakan isu intoleransi dalam beragama.

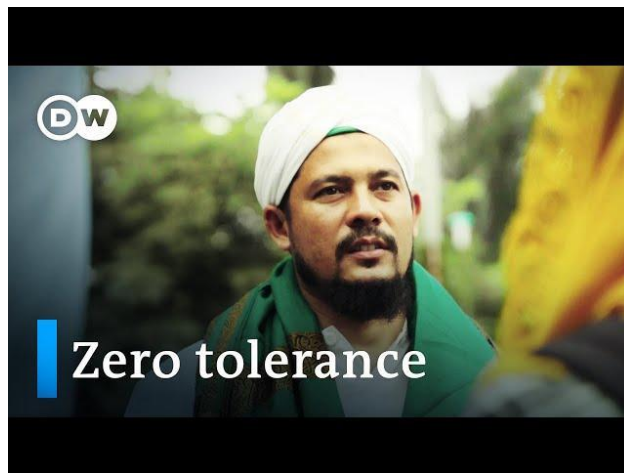
Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan masyarakat yang begitu heterogen, dianggap merupakan cerminan dari keberhasilan toleransi beragama, keberhasilan bangsa Indonesia dalam membentuk perdamaian merupakan sebuah contoh yang dapat ditiru oleh negara-negara yang sedang berada dalam konflik. Namun untuk tahun-tahun terakhir indikasi meningkatnya intoleransi di Indonesia mulai dirasakan, demo penuntutan terhadap Basuki Cahaya Purnama disinyalir merupakan bentuk

intimidasi mayoritas terhadap minoritas, di mana isu intoleransi dalam beragama ada di dalamnya.

Dalam deskripsi videonya DW menyebutkan "*The niqab, the face veil, is becoming increasingly popular. Members of minority groups feel marginalized*" (DW Documentary, 2020). Dari *statement* tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya terdapat perasaan terpinggirkannya kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, akibat meningkatnya pengguna niqab, cadar dan hijab, di mana peningkatan penggunaan tersebut diindikasikan oleh DW sebagai peningkatan interpretasi Islam yang cenderung ke arah konservatif. Untuk melihat bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat yang hidup di dalam hukum Islam yang dianggap oleh DW sebagai konservatif, DW memilih Provinsi Aceh sebagai tempat dibuatnya film tersebut.

Pada akhir deskripsi videonya, DW menjelaskan tujuan dari pembuatan film dokumenter sebagai. "*The documentary "Indonesia - Diversity Under Threat" asks whether the country can preserve its religious tolerance.*" (DW Documentary, 2020). Dari deskripsi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya DW pesimistis terhadap adanya toleransi dalam beragama, karenanya DW memilih Indonesia yang terkenal dengan toleransi dalam beragamanya, sebagai tempat pembuatan film tersebut dimana DW ingin membuktikan sendiri bagaimana "keberhasilan" dalam mempertahankan toleransi dalam beragama.

2.2.3. Profil Film Indonesia: Diversity Under Threat



Gambar 3. *Thumbnail* video youtube Indonesia: Diversity under threat
Sumber: Screenshot Via Youtube/DW Documentary

Judul: Indonesia: Diversity under threat

Tahun Produksi: 2020

Platform: Youtube

Durasi : 42 Menit 25 Detik

Sutradara: Sandra Perersmann, Hans Christian Ostermann

Kamera: Florian Mettke

Editing Video Dan Grading Warna: Andreas Hyronimus

Produser Lokal: Shinta Retnani, ASA Film

Sound Mixing: Andreas Goldacker

Musik: Jorg Seibold

Desain Grafis: Rami Ramezani

Manajer Produksi: Gesine Kruger

Produser: Jorg Seibold

Produser Eksekutif: Maren Wintersberg

Negeri Asal: Jerman

Bahasa: Inggris

Tanggal *Upload*: 28 Mei 2020

2.2.4. Profil Media



Gambar 4. logo Deutsche Welle

Jenis	: Media Penyiaran Internasional
Asal Negara	: Jerman
Tahun Didirikan	: 3 Mei 1953
Kantor Pusat	: Bonn, Jerman
Khalayak	: Jerman dan Internasional
Slogan	: Made for Minds
Situs Resmi	: www.dw.com

DW atau Deutsche Welle, merupakan sebuah media penyiaran internasional asal Jerman, dan salah satu media yang sukses di ranah internasional. *"Deutsche Welle (DW) is Germany's international broadcaster and one of the most successful and relevant international media outlets. In 2020."* (DW, 2020)

Pada awalnya DW merupakan sebuah stasiun radio dan TV, namun kini DW sudah merambah dunia internet melalui youtube officialnya, yaitu: DW Documentary, DW News, DW Indonesia, DW Documental dan DW Documentary وثائقية دي دبليو. Dalam youtubanya DW memiliki berbagai jenis konten, mulai dari berita, dokumenter pendek, film dokumenter berdurasi panjang, dengan berbagai macam isu yang diangkat. sampai saat ini dw memiliki siaran dalam 30 bahasa yang berbeda *"Deutsche Welle TV news which is currently being translated into thirty languages of the world...."* (Bilous et al., 2019).

Terkait dengan pendanaan, DW masuk ke dalam *public goods*, dalam kasus DW, pendanaan diambil dari pajak federal Jerman, "*DW is a public broadcaster financed by federal tax resources*" (DW, 2020). Dalam hal tersebut, jika disamakan dengan stasiun penyiaran di Indonesia, DW dapat disamakan dengan TVRI dalam artian, stasiun penyiaran yang dikelola langsung oleh negara.

Dalam pembuatan produknya, DW menggunakan sudut pandang (*worldview*) Jerman sebagai basis, dalam hal ini adalah demokrasi liberal yang berakar dari budaya Eropa, "*Our offerings convey Germany as a liberal democracy rooted in European culture, providing a forum for German (and other) points of view on important topics....*" (DW, 2020) hal ini dilakukan karena dari segi tradisi ideologi Jerman, selaku tempat asal DW, demokrasi liberal merupakan basis ideologi yang melandasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam demokrasi liberal sendiri, hak-hak pribadi, kebebasan berpendapat dan kebebasan individu menjadi konsen utama.

Peranan sebuah ideologi dalam sebuah produk media sangatlah penting, karena di dalam ideologi inilah, nilai, pandangan dan idea tentang yang salah dan benar berasal. Jika dilihat dari teori media *Hierarchy of Influences*, ideologi sangat berpengaruh pada produk media karena menjadi salah satu dari lima hal yang mempengaruhi konten dari media. Ideologi dalam sebuah media akan menentukan *frame* dari *output* media tersebut. Kecenderungan ini dapat kita lihat dalam pemberitaan DW, yang banyak berfokus pada kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia, yang sejalan dengan fokus demokrasi liberal "*Therefore, we focus on topics such as freedom and human rights, democracy and good governance...*" (DW, 2020), pengaruh dari sosial *cultur* Jerman dalam DW juga dapat terlihat dari salah satu poin netiket yaitu "*We do not tolerate any form of discrimination, racism, sexism, homophobia, abuse of minorities, religious insults, profanity or other forms of hate speech*" (DW, 2021) dari netiket

tersebut kita bisa melihat poin tidak mentolerir homophobia dalam artian dukungan terhadap LGBT, yang merupakan salah satu indikasi dari representasi liberalisme.

DW berharap konten-konten buatannya dapat memantik rasa ingin tahu *audience*, dan dapat menimbulkan diskursus di tengah masyarakat, DW bercita-cita dapat menjadi media yang bisa membuat *audience* berpikir tentang realitas yang sedang terjadi, hal tersebut sejalan dengan *take line* milik DW yaitu *Made for minds*. DW menempatkan diri sebagai agen penyedia informasi lalu mendorong *audience* membuat sendiri kesimpulannya. “*DW also tries to put its users in a position to draw their own conclusions...*” (DW, 2015). Karenanya konten-konten yang disajikan oleh DW bersifat publik dalam artian konten yang relevan dengan semua segmentasi masyarakat.

2.3. Film Dokumenter

2.3.1 Definisi Film Dokumenter

Dokumenter adalah tools yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kejadian nyata (realitas) dalam berbagai bentuk dan jenis. (Hayward, 1996; Utami, 2010). Film dokumenter menyajikan atau bertopik terkait sebuah kejadian yang nyata, non fiksi, yang memiliki unsur yang berbeda dari kebanyakan film. Film dokumenter berusaha menyajikan sebuah informasi kepada penonton secara langsung, seolah penonton ikut langsung ke dalam penelusuran yang dilakukan dalam proses pembuatan film.

Tidak seperti film biasanya yang mengandung unsur naratif seperti plot dan penokohan, film dokumenter tidak memiliki hal tersebut. Unsur naratif dalam film dokumenter cenderung minim. Film dokumenter memiliki struktur yang berlandaskan pada tema

yang diangkat, struktur tersebut dibuat dengan tujuan mempermudah pemahaman dari *audience* terkait informasi yang ditayangkan.

2.3.2 Unsur- Unsur Film Dokumenter

Unsur-unsur dalam film dokumenter terbagi atas unsur visual dan unsur verbal (Nelmes, 2012; Desak Putu, 2019)

1) Unsur visual terdiri dari:

a. Observasionalisme Reaktif

Pembuatan film dokumenter yang dibuat secara langsung di lapangan, tanpa persiapan terkait apa yang akan terjadi dalam proses dokumenter. Proses pengambilan gambar yang mengalir dan lebih kepada improvisasi, dalam hal tersebut pengambilan ketepatan gambar dan ketajaman pengamatan merupakan hal yang penting bagi videografer. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah terlewatkannya dokumentasi gambar, maupun kejadian yang memiliki nilai informasi sekaligus artistik yang tinggi.

b. Observasionalisme Proaktif

Pembuatan film dokumenter yang sudah dipersiapkan alur pengambilan dokumentasinya, di mana terdapat persiapan yang matang dalam proses pembuatan film, dan semua kejadian dan kenampakan yang akan terjadi dalam film sudah diketahui ketika proses persiapan pembuatan film berlangsung. Dalam *Observasionalisme Proaktif*, tampilan gambar biasanya lebih baik dari segi momen yang ditangkap dan pemilihan angle. Hal

tersebut karena segala jenis *camera technique* sudah terlebih dahulu dipersiapkan, karenanya memungkinkan untuk mendapatkan gambar dan video yang memiliki nilai informasi dan artistik yang tinggi.

c. Mode Ilustratif

Metode yang menggunakan visual untuk menjelaskan lebih lanjut terkait narasi dari sang narator. Disini unsur visual mengikuti unsur verbal, yaitu narasi yang diucapkan. Dalam mode Ilustratif unsur visual menjadi ilustrasi dari narasi, hal ini diharapkan akan memberikan kejelasan penggambaran tentang informasi yang ingin disampaikan kepada *audience*.

d. Mode Asosiatif

Dalam mode ini, unsur visual bisa diambil dari mana saja, tidak harus melulu ke arah objek yang didokumentasi. Mode asosiatif memungkinkan narator menghubungkan apa yang sedang didokumentasikan dengan objek luar dokumentasi yang memiliki kaitan dengan tema film yang sedang dibuat. Mode ini juga memungkinkan pembuat film untuk menggambarkan sebuah kejadian yang tidak bisa ditampilkan dalam gambar, karena tidak adanya dokumentasi tentang kejadian tersebut atau karena keterbatasan lainnya.

2) Unsur verbal terdiri dari:

a. *Overhead Exchange*

Sebuah rekaman yang seperti terjadi tidak diduga dan sembunyi-sembunyi, isi rekaman sendiri merupakan informasi tentang objek dari film dokumenter. Untuk unsur verbal *Overhead Exchange* pelaku dalam rekaman atau narasumber tidak sadar jika dirinya dijadikan sebagai informan dalam menambah data tentang objek yang dibuat dokumentasinya. Untuk rekaman yang didapat, karena dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan, biasanya memiliki kualitas yang kurang baik, dari segi kejernihan suara dan dalam kondisi yang buruk memerlukan subtitle agar *audiens* dapat mengerti apa yang dibicarakan.

b. Kesaksian

Merupakan rekaman wawancara dengan narasumber tentang informasi mengenai topik yang dibuat dalam film dokumenter. Untuk narasumber sendiri bisa merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang tema film yang dibuat seperti pakar, maupun masyarakat sekitar, bisa juga merupakan kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan. Berbeda dengan *overhead exchange*, narasumber dari kesaksian mengetahui bahwa informasi yang ia berikan akan digunakan, karenanya terdapat kemungkinan adanya informasi yang tidak diungkapkan.

c. Eksposisi

Merupakan penggunaan *voice over* maupun *vlogging* dalam film dokumenter. Di mana

narasi yang digunakan merupakan narasi hasil improvisasi, bukan narasi yang ada dan sudah dipersiapkan sebelum pembuatan film. Untuk dapat melakukan eksposisi seorang yang berhadapan langsung dalam kamera haruslah komunikatif, karena nilai dari eksposisi tersebut bertumpu pada bisa tidaknya narator menjelaskan tentang kejadian yang terjadi secara menarik dan informatif.

2.3.3. Sinematografi

Cinematography berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinema yang dapat diartikan sebagai gerakan lalu graphos yang artinya melukis, dari hal tersebut sinematografi dapat diartikan sebagai melukis gerakan (Partisan, 2008; Ramadhan dkk., 2018). Sinematografi merupakan salah satu unsur teknis (produksi) pada pembuatan film, unsur produksi disini merupakan bagaimana visual akan ditampilkan dalam film melalui bagaimana cara visual dari film tersebut diambil, seperti jarak yang digunakan, sudut yang dipakai, ketinggian dan durasi atau lama pengambilan gambar.

“Unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni: kamera dan film, framing, serta durasi gambar” (Pratista, 2008; Fardila, 2020).

1) Film dan Kamera

Merupakan unsur di mana kamera digunakan untuk mengambil gambar, dalam keadaan tersebut, akan digunakan teknik-teknik pengambilan gambar, agar tercipta rekaman gambar yang sesuai dengan keinginan. Karenanya unsur film dan kamera dapat disebut juga

sebagai unsur (*camera technique*) unsur yang secara murni visual, dalam hal ini contohnya adalah jenis lensa dan *color*.

2) *Framing*

Merupakan unsur bagaimana objek di depan kamera ingin ditampilkan (*positioning technique*), dalam unsur ini, harmoni dan keselarasan ikut masuk ke dalam unsur visual, unsur *framing* dalam film dapat dilihat dari bagaimana *frame* (batas gambar) dibuat, objek-objek yang ikut hadir menemani objek di depan kamera, jarak yang digunakan, juga kecepatan gerak kamera.

3) Durasi

Merupakan, tempo waktu atau lamanya sebuah objek depan kamera ingin diambil gambarnya, hal ini merupakan tahapan produksi yang menentukan berapa lama sebuah objek akan ditampilkan di dalam sebuah film.

2.3.4. Tipe Film Dokumenter

1) Tipe *Poetic*.

Film dokumenter tipe ini cenderung menekankan pada aspek emosi dari *audience*, dengan menggambarkan potongan-potongan kejadian peristiwa, diikuti oleh penggunaan unsur audio yang selaras dengan emosi apa yang ingin ditampilkan. Untuk tema yang digunakan cenderung bersifat universal, karena sifatnya yang lebih mengarah ke seni, poin-poin informasi yang ditekankan tidak bisa mendetail.

Dokumenter tipe *poetic*, merupakan dokumenter yang menekankan unsur *entertain* dibandingkan dengan unsur lain. Sinematografi, pilihan warna, transisi dan *frame* yang digunakan biasanya bersifat tajam. Terkait interpretasi dari film tersebut, sangatlah subjektif, jika mengarah ke pesan yang sifatnya khusus. Namun biasanya tipe *poetic* juga bisa dinikmati tanpa harus diketahui tujuan dari pesan-pesan yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut menuju ke arah mana.

Dokumenter tipe *poetic* sekarang, dengan berkembangnya sosial media dapat dengan mudah ditemui. Banyak *content creator* membuat video yang memiliki tema yang sama dengan dokumenter tipe *poetic*. Untuk konten video tersebut sendiri biasa disebut dengan *aesthetic* video. Ada kesamaan dari dokumenter tipe *poetic* dengan konten *aesthetic* video, di mana keduanya sama-sama menekankan unsur seni (*to entertain*) dibanding informasi (*to inform*).

2) Tipe *Observation*.

Observational adalah, tipe film dokumenter di mana penggunaan narasi yang digunakan tidak bersifat mengomentari, narasi hanya sebatas memperjelas apa yang terjadi di dalam gambar yang ditampilkan. Dalam tipe ini, film dokumenter cenderung berpoin pada penampakan gambar yang dipilih, dari gambar-gambar itulah *audience* akan memaknai dan menangkap pesan yang ingin ditampilkan melalui film dokumenter tersebut.

3) Tipe *Interactive*.

Film dokumenter *Interactive*, merupakan film dokumenter yang menyoroti interaksi yang terjadi antara subjek di dalam film yang dibuat dengan pembuat film. Hal ini karena dari interaksi yang terjadilah sumber dari informasi didapat. Interaksi itu biasa berupa, wawancara secara langsung dengan narasumber.

4) Tipe *Reflexive*.

Merupakan tipe film dokumenter yang selain menayangkan objek dalam film, namun juga proses di mana film tersebut dibuat. Hal ini dilakukan untuk memberitahu penonton tentang proses pembuatan film tersebut, dengan begitu selain mengetahui objek yang didokumentasikan, penonton juga mengetahui bagaimana proses mendokumentasikan objek tersebut.

5) Tipe *Performative*.

Merupakan film dokumenter yang menyajikan informasi dengan mengedepankan unsur-unsur estetika yang lebih ekspresif, dalam hal ini unsur subjektivitas dalam pemaparan cerita sangatlah kuat.

6) Tipe *Expository*.

Film dokumenter *expository*, merupakan film dokumenter yang menggunakan narasi sebagai titik tumpu jalannya cerita. Di mana narasilah yang menjelaskan terkait unsur visual yang ditampilkan di dalam film tersebut, hal ini berhubungan dengan tujuan yang ditekankan pada tipe film *expository* adalah untuk menyampaikan informasi, karenanya narasi dijadikan media utama yang digunakan,

hal tersebut karena sifat dari gambar dan komunikasi visual yang terkesan abstrak.

Terkait jenis film dokumenter *expository* dapat dicontohkan oleh film dokumenter keluaran Deutsche Welle (DW), yaitu Indonesia: *Diversity Under Threat*, dalam film tersebut dapat dilihat bagaimana unsur naratif dari narator ditampilkan, dan dari narasi tersebut kita bisa mendapat informasi bagaimana praktek Islam Konservatif di Aceh.

2.4. Islam Konservatif

2.4.1. Pengertian Islam Konservatif

Menurut Muhammad zhar, (1997) konservatisme merupakan kecenderungan bertahan pada nilai nilai tradisional, yang sudah dianut sejak lama/status quo, yang berakibat pada kecenderungan menolak nilai nilai dari pandangan baru, yang berpotensi menimbulkan perubahan (Al Muiz dan Miftah, 2020). Dalam pandangan konservatif perubahan bukanlah sebuah hal yang dikehendaki, hal ini sangat bertolak belakang dengan pandangan liberal yang selalu haus akan perubahan. Hal tersebut cenderung mengakibatkan kekakuan dan munculnya sikap takut akan perubahan. Di dalam Islam, pemikiran konservatif disebut dengan Aliran religius konservatif (al diny al muhafidh). Diantara tokoh dalam aliran ini yaitu al-Ghazâli, Nashirudin al Thusi, Ibn Sahnun al Abisi dan Ibn Hajar al Haitami (Ridla, 2002; Al Muiz dan Miftah, 2020).

Konservatisme islam di Aceh banyak dikaitkan dengan penerapan hukum syariah di Aceh. Aguswandi (2006) berpendapat

bahwasanya islam konservatif yang dicontohkan oleh Aceh dengan hukum syariatnya, merupakan dampak dari pembiaran berkuasanya kelompok konservatif.

2.4.2 Syariat Islam di Aceh

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki hak otonomi khusus berupa penerapan hukum syariat. Untuk penamaan sendiri, Nanggroe Aceh Darussalam digunakan dari tahun 2001 sampai 2009 dan semenjak 2009 berubah menjadi Aceh sampai saat ini. Aceh merupakan daerah yang memiliki persentase penduduk muslim tertinggi di Indonesia.

Untuk penerapan hukum syariat sendiri, sudah ada sejak zaman Kesultanan Islam Aceh berdiri, hingga ketika pendudukan belanda dan pra kolonial. Alasan inilah yang membuat daerah Aceh begitu keras mempertahankan hukum syariat di daerah mereka meskipun terdapat pro dan kontra dalam hal tersebut, namun hukum syariat tetap dijalankan karena terdapat nilai historis yang panjang di balik hal tersebut.

“Penerapan Hukum Pidana Islam (Jināyāt) di Aceh dalam konteks ke indonesian tidak terlepas dari dampak latar belakang penerapan syariat Islam dalam sosio-historis masyarakat Aceh. Sejak pra-penjajahan (1903) dan awal kemerdekaan (1945) masyarakat Aceh telah memiliki kecenderungan untuk menerapkan syariat Islam dengan pembentukan Lembaga Qadā’ (Maḥkamah Syarīyah),” (Dja’far, 2018).

Dalam rangka memperoleh hak untuk melaksanakan hukum syariat, banyak sekali tantangan yang dilewati Aceh, karena upaya dalam penerapan hukum syariat tersebut kebanyakan tidak sejalan

dengan visi misi pemimpin NKRI kala itu, dan kebanyakan pemberian keotoritasan kepada Aceh secara mandiri hanyalah sebuah janji yang tak kunjung terealisasi. Hal-hal inilah yang membuat Aceh banyak melakukan gerakan pemberontakan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya gerakan pemberontakan GAM, (Gerakan Aceh Merdeka) lalu gerakan NII (Negara Islam Indonesia), kedua gerakan tersebut merupakan gerakan memperjuangkan hak otonomi khusus yang membuat Aceh bisa menerapkan hukum syariat di daerahnya.

Pergolakan terkait gerakan-gerakan di Aceh mulai mereda ketika presiden B. J. Habibie menandatangani UU tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (UU No.44 Tahun 1999) serta penandatanganan pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, terkait Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang masih berlaku hingga sekarang. Kedua UU tersebut memberikan kebebasan kepada Aceh untuk menerapkan unsur syariat dalam seluruh aspek kehidupan sosial termasuk penerapan *Jināyāt* atau Hukum Pidana Islam.

Penerapan hukum jinayat merupakan indikator dari terselenggarakannya hukum syariat di Aceh. Dalam perumusannya, jinayat di Aceh mendapat banyak kontribusi dari presiden Indonesia keempat, Abdurahman wahid. Abdurahman wahit, memberikan pandangan penting terkait penerapan hukum jinayat yaitu terkait *punishment and prevention*, karena pandangan dari Gus Dur inilah, penerapan hukum jinayat seperti rajam dan potong tangan di Aceh tidak diterapkan.

“Beliau mengatakan maksud dari qisas dari ayat Al-Qur’an tentang hukum *Jināyāt*: “jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan

mata (dalam naṣṣ) adalah untuk pencegahan”. Maka penafsiran ḥadd potong tangan bagi tindak pidana pencurian agar tidak diberi makna secara zahiriyah ayat. Namun yang terpenting ada dua prinsip yaitu “menghukum dan mencegah” (Dja’far, 2018).

Pada awalnya penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh tertuang dalam Qanun jinayat Aceh tahun 2003, No 12, 13 dan 14. Namun kini terdapat perubahan dengan digantikannya qanun jinayat tersebut oleh Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, di mana adanya tambahan konsepsi qanun hukum yang tadinya hanya 3 (tiga) menjadi 10 (sepuluh) hal tersebut terkait dengan perincian dari Qanun jināyāt tentang khalwāt, dan juga reaksi terhadap isu LGBT. Adapun perincian dari konsepsi Qanun Hukum yaitu:

- a) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Kesatu *Khamar* (Minuman Keras).
- b) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Kedua *Maisir* (Judi).
- c) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Ketiga *Khalwat*.

Menurut Saifullah (2020) khalwat merupakan perbuatan yang dapat menuju kepada zina, khalwat sendiri biasa diasosiasikan dengan kegiatan dengan sukarela bersama bersembunyi sembunyi antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan maupun mahram.

- d) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Keempat *Ikhtilath*.

Ikhtilath merupakan kegiatan bermesraan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan maupun mahram, yang dilakukan secara sadar dan sukarela seperti berciuman dan berpelukan baik di tempat terbuka maupun tertutup. (Saifulla, 2020).

- e) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Kelima Zina.
- f) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Keenam Pelecehan Seksual.
- g) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Ketujuh Pemerksaan.
- h) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Kedelapan *Qadzaf*.

Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, (Saifullah, 2020).

- i) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Kesepuluh Liwath (homoseksual).
- j) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah Dan ‘Uqubat Bagian Kesebelas Musahaqah (lesbian).

Selain *punishment* seperti jinayat, daerah Aceh juga menerapkan *razia* dan *sweeping* terkait pencegahan tindakan-tindakan yang dapat menjurus kepada pelanggaran peraturan daerah Aceh. Untuk *razia* dan *sweeping* sendiri, Aceh memiliki tim khusus yaitu polisi syariat, hal ini dilakukan untuk memenuhi asas *prevention* dari artian *qisas* ayat Al-Qur'an tentang hukum *Jināyāt*. *Sweeping* oleh polisi syariat juga hukum cambuk yang merupakan bagian dari penerapan *Jināyāt* inilah yang banyak direpresentasikan sebagai indikasi dari islam konservatif karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai inklusivitas.

2.5. Inklusivitas

Inklusivitas, atau keterbukaan, merupakan sebuah sikap saling menghargai dan kemampuan dalam melihat sebuah persoalan menggunakan sudut pandang orang lain.

2.5.1. Inklusivitas Dalam Sudut Pandang Internasional

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945, dan beranggotakan 193 negara. PBB dibangun dengan tujuan menjaga perdamaian dunia, sekaligus membahas isu-isu permasalahan yang akan dihadapi umat manusia, seperti hak asasi, perubahan iklim, dan sebagainya. Diantara banyaknya isu yang dibahas oleh PBB, PBB memiliki tiga pilar utama isu yang menjadi konsen, yaitu perdamaian dan keamanan, pembangunan juga hak asasi manusia. Sebagai sebuah organisasi besar internasional, cara pandang PBB terkait inklusivitas dapat menjadi rujukan dari penerjemahan inklusivitas dalam sudut pandang dunia internasional.

Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, PBB membentuk sebuah program yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program lanjutan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri merupakan sebuah program yang dicanangkan dengan tujuan untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan yang berhubungan dengan isu global, di mana berdasarkan *United Nations/PBB*, yang dilansir dari sdgs.un.org tujuan tersebut antara lain:

- 1) *No Poverty*
- 2) *Zero Hunger*
- 3) *Good Health And Well-Being*
- 4) *Quality Education*
- 5) *Gender Equality*
- 6) *Clean Water And Sanitation*
- 7) *Affordable And Clean Energy*
- 8) *Decent Work And Economic Growth*
- 9) *Industry, Innovation And Infrastructure*
- 10) *Reduced Inequalities*
- 11) *Sustainable Cities And Communities*
- 12) *Responsible Consumption And Production*
- 13) *Climate Action*
- 14) *Life Below Water*
- 15) *Life On Land*
- 16) *Peace, Justice And Strong Institutions*
- 17) *partnerships For The Goals*

Untuk 17 tujuan besar tersebut, The Social Progress Imperative, selaku supporting SDGs program, mengelompokannya menjadi tiga klasifikasi besar, yaitu:

1. *Basic Human Needs,*
2. *Foundations Of Wellbeing,*
3. *Opportunity.*

Terkait dengan inklusivitas, *The Social Progress Imperative*, memasukkannya ke dalam judul besar *opportunity*. adapun sub judul dalam judul besar *opportunity* antara lain:

1. *Personal Right*, yang selaras dengan tujuan SDGs nomor 1. *No Poverty*, 5. *Gender Equality* dan 16. *Peace, Justice And Strong Institutions*
2. *Personal Freedom And Choice*, yang selaras dengan tujuan SDGs nomor 3. *Good Health And Well-Being*, 5. *Gender Equality*, 8. *Decent Work And Economic Growth*, 10. *Reduced Inequalities* dan 16. *Peace, Justice And Strong Institutions*
3. *Inclusiveness*, yang selaras dengan tujuan SDGs nomor 5. *Gender Equality*, 10. *Reduced Inequalities*, 11. *Sustainable Cities And Communities* dan 16. *Peace, Justice And Strong Institutions*
4. *Access To Advanced Education*, selaras dengan tujuan SDGs Nomor 4. *Quality Education* dan, 9. *Industry, Innovation And Infrastructure*

Dari penjabaran sub judul dalam *opportunity* kita bisa melihat bahwasanya inklusivitas/ *Inclusiveness* dari sudut pandang internasional berkaitan dengan 4 poin tujuan dari dilaksanakannya SDGs, di mana jika ke 4 poin tersebut dijabarkan akan memperjelas apa saja polemik yang menurut dunia internasional berhubungan dengan *Inclusiveness*, adapun penjabaran dari ke 4 poin tujuan tersebut adalah:

1. *Point 5. Gender Equality* (Kesetaraan Gender).

Dalam point 5, yang menjadi sorot perhatian adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, seperti kesamaan hak antara laki laki dan perempuan dalam berbagai akses sosial, menghilangkan perilaku kekerasan terhadap perempuan dan mencegah praktik-praktik yang berbahaya bagi perempuan seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa.

2. *Point 10. Reduced Inequalities* (Mengurangi Ketimpangan).

Dalam poin 10, kenaikan upah kerja yang sesuai merupakan hal yang diutamakan, ini dilakukan guna mengurangi ketimpangan. Dorongan terhadap penghapusan peraturan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, diskriminatif dan merugikan pekerja. Selain itu di dalam poin ini terdapat juga seruan untuk mengkampanyekan inklusivitas sosial agar tidak ada perbedaan akses terhadap kesejahteraan akibat perbedaan ras, etnis, gender atau agama

3. *Point 11. Sustainable Cities And Communities* (Kota dan Masyarakat yang Berkelanjutan).

Dalam poin 11, menekankan tentang pembangunan kota yang ideal dan inklusif, juga penyediaan sarana transportasi umum yang ramah lingkungan dan dapat diakses oleh semua orang, hal ini dilakukan guna mengurangi daerah kumuh, sekaligus guna menciptakan lingkungan kehidupan yang memadai, sebuah kawasan kota yang ideal di mana setiap individu di dalamnya bisa terpenuhi kebutuhannya, juga bisa ikut berkontribusi di dalamnya.

4. *Point 16. Peace, Justice And Strong Institutions* (Kedamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Terdapat 3 hal yang ditekankan dalam poin ke 16, yaitu kedamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Ketiga hal ini merupakan hal yang berkaitan satu sama lain, untuk meraih sebuah kedamaian harus ada keadilan, dan untuk menegakkan keadilan harus ada kelembagaan yang kuat. Adapun hal-hal yang dimaksudkan dengan kedamaian adalah dengan menghilangkan praktek kejahatan dan terorisme yang sifatnya terorganisir, perdagangan manusia dan kekerasan. Untuk keadilan adalah dengan menerapkan inklusivitas, dalam artian kemudahan dan hak yang sama terhadap publik akan akses terhadap lembaga-lembaga, juga terhadap supremasi hukum. Untuk kelembagaan yang kuat sendiri berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, juga keefektifan lembaga dalam mewujudkan sistem yang dapat mengurangi praktek kejahatan juga ketidakadilan.

Untuk mengukur poin naik turunnya inklusivitas The Social Progress Imperative, membuat sebuah standarisasi penilaian, di mana penilaian-penilaian tersebut akan menjadi tolak ukur dari tinggi rendahnya skor inklusivitas suatu negara, dari aspek-aspek penilaian tersebut kita bisa mengetahui tentang apa saja yang menyebabkan sebuah negara digolongkan menjadi negara yang inklusif maupun sebaliknya, adapun aspek-aspek yang menjadi parameter dari penilaian skor inklusivitas adalah:

1. *Acceptance of gays and lesbians* (Penerimaan kaum gay dan lesbian).

Menurut Santoso (2016), PBB secara resmi mengeluarkan pengakuan atas hak-hak LGBT pada tahun 2001, di mana resolusi tersebut dikeluarkan oleh bagian dewan hak asasi manusia dari PBB. Hal itu menjadi *legal standing* bagi kaum LGBT dalam mengampanyekan hak mereka. Mereka

berpendapat bahwasanya orientasi seksual merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan investigasi, Kaum LGBT menerima banyak kekerasan, diskriminasi dan kebencian terkait dengan orientasi seksual yang mereka miliki. Dengan adanya penerimaan masyarakat luas terhadap kaum LGBT diharapkan akan menurunkan kekerasan dan diskriminasi yang di latar belakang oleh perbedaan orientasi seksual.

2. *Discrimination and violence against minorities* (Diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas).

Efek dari tidak meratanya kekuatan politik adalah besarnya potensi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok lain. Kelompok lain yang biasanya menjadi sasaran praktik diskriminasi dan kekerasan adalah kelompok minoritas, hal ini dikarenakan kelompok minoritas tidak memiliki kekuatan politik akibat tidak terbukanya akses penuh atas kekuatan politik. Praktik ini juga bisa dihubungkan dengan isu rasisme, di mana adanya kecenderungan untuk menganggap sebuah kelompok lebih superior dari kelompok lain.

3. *Equality of political power by gender* (Kesetaraan kekuatan politik berdasarkan gender).

Kesetaraan dalam gender merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan, di mana kesetaraan gender masuk ke dalam salah satu faktor dari *Human Development Index*, sebuah mekanisme baru dalam mengukur kesuksesan pembangunan. Kesetaraan gender dalam kekuatan politik sendiri merupakan kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan untuk bisa ikut berkontribusi dalam ranah politik. Dengan kesamaan partisipan politik antar gender akan didapat penyelenggaraan politik yang lebih adil. Kesetaraan kekuatan politik berdasarkan gender dianggap penting karena

dari praktik politik yang diskriminatif terhadap gender lah segala permasalahan ketidakadilan gender muncul.

4. *Equality of political power by socioeconomic position* (Kesetaraan kekuatan politik berdasarkan posisi sosial ekonomi).

Adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban antar masyarakat yang berbeda posisi sosial ekonomi, sekaligus adanya kesamaan akses untuk ikut berkontribusi dalam sebuah proses pembuatan suatu kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan politik tidak terpusat pada posisi sosial ekonomi tertentu, yang bisa berakibat pada kecenderungan munculnya kebijakan yang bersifat merugikan kelompok lain, karenanya kekuatan politik harus didistribusikan secara adil kepada tiap golongan masyarakat, agar menghasilkan sebuah kebijakan yang menguntungkan semua golongan.

5. *Equality of political power by social group* (Kesetaraan kekuatan politik menurut kelompok sosial).

Adalah pendistribusian kekuatan politik secara adil kepada semua kelompok sosial di masyarakat, kelompok sosial disini merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk akibat kesamaan visi misi, kesadaran *in group* dan perasaan memiliki. Kelompok sosial biasanya berlandaskan pada rasialisme, ke keluarga maupun kesukuan, karenanya potensi penyelewengan kekuatan politik sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus KKN. Pendistribusian kekuatan politik secara adil akan menurunkan tensi ketegangan antar kelompok, karena mengurangi kemungkinan adanya kelompok sosial yang merasa di bawah atau lebih rendah dari kelompok sosial lain.

2.5.2. Inklusivitas Dalam Sudut Pandang Nasional

Inklusivitas dianggap oleh Fathy (2019), sebagai sebuah social capital yang diperlukan masyarakat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup bermasyarakat, maupun untuk membangun sebuah bangsa. Lebih jauh lagi oleh Barida (2017), inklusivitas merupakan sebagai salah satu modal yang harus dimiliki manusia untuk mencapai *antraxia*.

Menurut Rosidi (2016), inklusivitas merupakan kemampuan dalam menyeimbangkan nilai-nilai positif yang diambil dari sekularisme dan spiritualitas operatif selaku bukti dari ketaatan dalam beragama. Inklusivitas merupakan *output* dari interaksi sosial masyarakat, dalam hal ini inklusivitas terbentuk dari tiga hal yaitu, 1. pandangan *cultural*, 2. kedudukan sosial seseorang, dan 3. kecenderungan emosi personal. Menurut Barida (2017), inklusivitas dapat dibentuk, ia berpendapat bahwasanya, paparan media massa terutama televisi dan pendidikan formal seorang individu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap inklusif seseorang.

Jika ditinjau dalam sudut pandang bernegara, inklusivitas dapat dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, dimana wawasan kebangsaan sendiri berkaitan erat dengan nilai-nilai falsafah bangsa yang dalam hal ini merupakan Pancasila. Pengamalan Pancasila secara utuh dan benar dalam kehidupan bernegara akan melahirkan sebuah kehidupan masyarakat yang inklusif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pancasila sendiri, jika dilihat dari butir-butir pengamalan, semua sila memiliki poin tentang toleransi dan inklusivitas, hal ini menunjukkan betapa krusialnya sikap inklusif bagi masyarakat Indonesia yang begitu majemuk.

Meskipun berada di dalam setiap butir-butir pengamalan Pancasila. Barida (2017), berpendapat bahwasanya sila dari Pancasila yang secara penuh mewakili inklusivitas merupakan sila pertama: ketuhanan yang maha esa, yang menjamin inklusivitas dalam beragama, dalam artian tidak melanggar hak beragama dari kelompok agama lain, lalu sila ketiga: persatuan Indonesia, yang mengharuskan sikap inklusif untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari bermacam suku, bahasa dan agama.

Jika kita paparkan sila pertama dan ketiga bersama dengan butir-butir pengamalannya berdasarkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2014) maka akan didapati poin-poin sebagai berikut :

1. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Sila ketiga Persatuan Indonesia

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Meskipun sudah tertuang dalam butir-butir pengamalan Pancasila, bagaimana itu inklusivitas yang sesuai dengan Pancasila masih dalam perdebatan. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan sebuah falsafah, dalam artian sebuah sumber-sumber nilai yang di mana sumber-sumber tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Penafsiran secara berbeda beda tersebut menyebabkan kerelatifan interpretasi dari inklusivitas di Indonesia, dan hal tersebut merupakan *output* dari kemajemukan bangsa ini. Tidak seperti dunia internasional yang memiliki standar interpretasi dari apa itu inklusivitas. Keanekaragaman *kultur* di Indonesia membuat inklusivitas sulit untuk distandarisasi, hal ini menyebabkan standar dari inklusivitas berbeda-beda disetiap daerah. Karenanya pengamalan sikap inklusif di Indonesia adalah dengan menghargai standar inklusif dari tiap-tiap daerah yang berbeda.

Di Indonesia, permasalahan terkait interpretasi dari inklusivitas terjadi, karena Inklusivitas sangat sulit dipisahkan dengan liberalisme, pemisah dari kedua hal tersebut hanyalah pemahaman dan persepsi, tidak ada garis pasti yang dapat menjadi patokan. Pelekatan antara inklusif dengan liberal dapat dilihat dari pandangan orang-orang terhadap tokoh nasional Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Untuk orang-orang yang hidup di kalangan Nahdliyin akan menganggap Gus Dur sebagai tokoh yang inklusif dan toleran, namun bagi sebagian orang, kecenderungan Gus Dur dianggap sudah melenceng dan masuk ke dalam ranah liberal, dan banyak orang-orang yang beranggapan seperti itu merupakan para kiai sepuh yang juga merupakan tokoh internal dari kalangan NU.

Dari perbedaan pendapat tentang dimana Gus Dur duduk, di sisi inklusif atau liberal. Tokoh tokoh yang menganggap Gus Dur sebagai tokoh yang liberal ditunjuk sebagai orang-orang yang berpikiran masih tradisional, kekurangan literatur, dan konservatif. Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwasanya di Indonesia inklusif melekat dengan liberal berlawanan dengan konservatif yang melekat dengan tradisional.

2.6. Konservatif

Menurut Wisarja dan Sudarsana (2017) konservatisme merupakan kecenderungan untuk mempertahankan sebuah sistem yang sudah berjalan, dalam artian sebuah sistem yang sudah memiliki sejarah historis. Kedudukan konservatisme sendiri masih banyak diperdebatkan, tokoh yang tidak menggolongkan konservatisme sebagai ideologi adalah Michael Oakeshott dan Russel Kirk. Oakeshott (1967) dalam Ismail (2011), Berpendapat bahwasanya kedua tokoh tersebut menyatakan konservatif bukanlah sebagai ideologi melainkan sebagai sebuah kecenderungan. Adapun tokoh yang menggolongkan konservatisme

sebagai sebuah ideologi adalah Matthew Festenstein dan Michael Kenny, di mana Matthew Festenstein dan Michael Kenny berpendapat bahwasanya konservatisme merupakan ideologi, teori dan sistem kepercayaan (Festenstein & Kenny, 2005 ; Ismail, 2011).

Konservatisme sendiri bisa menjadi basis dasar dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat politik, seperti tentang hak dan kewajiban penguasa, lalu hak dan kewajiban yang dimiliki rakyat, juga dasar dari penyangga otoritas kekuasaan. Berbeda dengan teori-teori atau ideologi yang menyimpulkan jawaban melalui hasil abstraksi pikiran, konservatisme dianggap memberikan jawaban yang lebih terbukti karena jawaban diperoleh melalui hasil perjalanan historis. Meskipun konservatisme sering dianggap sebagai kecenderungan untuk menolak perubahan, namun pada faktanya kecenderungan tersebut lebih ke arah tidak menghendaki sebuah ketidakstabilan. Berbeda dengan liberalisme yang menghendaki perubahan besar, radikal dan menyeluruh, konservatisme lebih senang dengan perubahan yang pelan dan terukur, perubahan yang tidak mengganggu kestabilan sosial yang sudah dibangun.

Pola-pola dari konservatisme awalnya sangat sulit dilihat, terutama dari perkembangan pemikirannya, hal ini dikarenakan konservatisme merupakan upaya dan hasrat untuk melindungi sebuah sistem. Namun bentuk dari konservatisme mulai terlihat akibat dari kemunculan Edmund Burke, seorang tokoh politik yang menentang revolusi Perancis. Dengan aliran pemikiran konservasinya ia melemparkan gagasan-gagasan terkait penolakan terhadap revolusi Perancis. Gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh Edmund Burke yang bersifat konservatif, dianggap sebagai tonggak awal tradisi pemikiran konservatif klasik.

Kristeva (2015) berpendapat bahwasanya Burke merasa terganggu oleh Pencerahan, dan menganjurkan nilai tradisi. Kecemasan Burke terhadap pencerahan diakibatkan oleh gagasan-gagasan yang mengharuskan

masyarakat disatukan oleh ide-ide yang sifatnya abstrak, hal ini merupakan sebuah gagasan yang baru dan dapat dianggap sebagai percobaan sosial. Dari penolakan Burke itulah, pelabelan konservatif sebagai aliran pemikiran yang menentang gagasan-gagasan baru dan lebih memilih nilai-nilai tradisional dimulai.

Terkait dengan penerapan konservatif sebagai ideologi, biasa disebut sebagai proses pengintitusian nilai-nilai tradisional, maksudnya adalah menarik nilai-nilai tradisional dalam sebuah konsep yang dimana konsep tersebut bisa diimplementasikan ke dalam organisasi maupun institusi. Untuk penggunaan konservatisme sebagai ideologi, dapat kita lihat dalam Partai Konservatif Inggris yaitu Partai Konservatif Dan Unionis. Dalam sejarahnya partai tersebut bernama Partai Tory, pada abad 19 partai Tory dengan aliran konservatif nya menjadi partai yang sangat kuat bersamaan dengan lawannya yaitu Partai Liberal, namun karena tujuan yang bersifat pragmatis Partai Tory yang beraliran konservatif bergabung dengan Partai Unionis Liberal, lalu berubah nama menjadi Partai Konservatif dan Unionis. Dari bergabungnya Partai Tory dan Unionis Liberal, kita dapat mengetahui bahwasannya dari segi implementasi dalam sebuah partai, liberalisme dapat disandingkan dengan konservatisme. Namun seiring berjalannya waktu, ke konservatif dari Partai Konservatif dan Unionis mulai dipertanyakan, hal ini dikarenakan banyaknya gagasan ekonomi liberal klasik yang diusung partai tersebut, hal ini berakibat pada runtuhnya filosofi partai dan nilai-nilai tradisional di dalamnya. Menurut Kristeva (2015), Hilangnya nilai-nilai filosofi dari partai membuat masyarakat tidak bisa mengetahui secara pasti nilai-nilai apa yang dianut oleh partai tersebut, hal ini menyebabkan hilangnya jati diri dari partai tersebut.

Terkait dengan bagaimana konservatisme diterapkan pada ideologi partai kita dapat melihat dari berbagai partai beraliran konservatif di dunia. Dari beberapa partai tersebut memiliki arah kebijakan politik yang berbeda satu

sama lain, hal ini dapat diartikan bahwa konservatisme bukanlah nilai-nilai yang dicenderung, melainkan sebuah kecenderungan untuk mempertahankan nilai nilai.

Terkait dengan klaim kecenderungan konservatisme selalu dihubungkan dengan agama adalah sebuah hal yang tidak selamanya benar. Kita bisa melihatnya dari kecenderungan Partai Konservatif di wilayah Nordik di mana konservatisme yang diusung merupakan pencampuran dengan aliran politik yang bisa disebut berlawanan dengan nilai-nilai konservatif, seperti demokrasi dan liberal, hal yang bisa membuat penyatuan pandangan tersebut adalah pembagian orientasi kebijakan, di mana partai-partai konservatif Nordik mengkhususkan pemikiran konservatif pada kebijakan yang bersifat politik dan untuk kebijakan yang bersifat sosial dan ekonomi menggunakan pemikiran yang liberal. Untuk partai konservatif yang masih menggunakan basis agama sebagai dasar ideologi adalah partai konservatif, Christian Democratic Union di Jerman, Christian Social Union di Bavaria lalu The Christian Democratic Appeal di Belanda, ketiga partai tersebut menganut paham konservatif yang berlandaskan pada ajaran sosial katolik.

Dari perbedaan kecenderungan partai beraliran konservatif di dunia, kita bisa mengetahui bahwasanya konservatif merupakan hal yang eksklusif, dalam artian konservatif dipandang berbeda disetiap wilayah. Kecenderungan terhadap *kultur* demokrasi di wilayah yang memang secara historis menerapkan *cultur* demokrasi merupakan sebuah konservatisme, lalu untuk wilayah yang terbiasa dengan *cultur* otoritarian, kecenderungan terhadap otoritarianisme merupakan sebuah konservatif. Terkait Dengan dipertentangkannya konservatisme dengan liberalisme merupakan efek dari hegemoni negara-negara yang memiliki kepentingan, karena pada dasarnya liberalisme sendiri merupakan konservatisme di dalam *cultur* wilayah Nordik, hal ini dibuktikan oleh partai-partai konservatif Nordik yang beraliran liberal.

2.7. Representasi

Menurut Eryanto (2005) representasi bisa diartikan sebagai pesan media yang ditampilkan dalam wacana media, yang dibuat untuk mencerminkan sebuah gagasan, ide, maupun citra. Dalam makna luas representasi dapat mengacu pada penggambaran kelompok-kelompok dan institusi sosial" (Burton, 2007; Suwarno, 2014).

Adapun media yang digunakan sebagai sarana representasi bisa beragam, yaitu, buku, majalah, film, lagu maupun lukisan. Dari hal tersebut, kita bisa menyimpulkan representasi sebagai kegiatan membangun sebuah konsep yang utuh dari simbol-simbol yang ditampilkan dalam sebuah pesan media. Representasi sangat bergantung pada bagaimana hal-hal yang biasanya terjadi dalam kehidupan dirangkai dan digambarkan, dalam hal ini representasi sangat erat kaitannya dengan stereotip dan pengetahuan umum terkait hal yang ingin dibangun.

Representasi sangatlah erat kaitannya dengan studi semiotik, hal ini dikarenakan, inti dari representasi adalah proses membangun struktur pemaknaan dalam menggambarkan sesuatu melalui simbol-simbol yang ditampilkan. Dan semiotika merupakan proses memaknai simbol-simbol yang ditampilkan dan lebih jauhnya membongkar struktur yang membangun makna dari simbol tersebut.

2.8. Semiotika

2.8.1 Konsep Semiotika

Semiotika merupakan sebuah studi yang membuat kita melihat sebuah tanda, simbol maupun entitas tertentu, sebagai sebuah pesan yang mewakili sesuatu hal (Budiman, 2003; Bramasto, 2006).

Semiotika merupakan sebuah analisis yang biasa digunakan untuk menjelaskan tanda-tanda yang hadir dalam sebuah pesan media, yang di mana pesan media tersebut bisa berupa gambar, suara maupun tulisan. Dalam semiotika terdapat tiga unsur yang harus dipahami yakni, tanda, acuan tanda dan penggunaan tanda, hal ini berkaitan dengan fungsi semiotika yang juga melihat bagaimana tanda-tanda yang digunakan bekerja di dalam sebuah pesan media. Adapun kesimpulan umum dari semiotika, dapat diartikan sebagai penafsiran akan simbol maupun lambang-lambang.

2.8.2 Konsep Semiotika Roland Barthes

Teori semiotika Roland Barthes merupakan teori semiotika turunan De Saussure, yang menjadi pembeda adalah adanya asumsi Barthes tentang bahasa, yakni bahasa merupakan produk dari kondisi sosial masyarakat, sekaligus adanya tenggat waktu dari sebuah makna yang terkandung di dalamnya (Sobur, 2009; Taranita, 2017). Selain itu “Yang membedakan teori semiotika milik Barthes dengan Saussure adalah munculnya istilah makna denotasi (*denotatif*) dan konotasi (*connotative*)”.(Piliang, 2003).

Perbedaan ini muncul, karena menurut Roland Barthes, sistem pemaknaan milik De Saussure menyatukan pemaknaan yang bersifat *denotative* dan *connotative* ke dalam bagian petanda (*signifiant*), padahal menurut Roland Barthes pemaknaan tersebut haruslah dipisah karena memiliki tingkatan level pemaknaan yang berbeda satu sama lain. Pemisahan oleh Roland Barthes juga didasari oleh tidak maunya Barthes menyebut pemaknaan yang berbasis dari ideologi dan konstruksi sosial budaya (mitos), disebut sebagai makna yang sesungguhnya. Karena makna sesungguhnya merupakan makna yang hanya sedikit mendapat campur tangan

konstruksi sosial, bukan sebuah makna yang *full* merupakan konstruksi di dalamnya.

Penyatuan antara makna denotatif dan konotatif dalam teori semiotika De Saussure ini lah, yang menurut Barthes menyebabkan banyak kesalahan memaknai sebuah bacaan, karena pembaca mengira makna secara *connotative* (pemaknaan level dua) merupakan makna *denotative* (pemaknaan level satu), padahal keduanya memiliki sistem pemaknaan yang berbeda tingkatan, dari segi referensi dalam memahami konteks yang menjadi penanda (*signifier*). Karena itu, menghindari misreading dan misunderstanding merupakan salah satu tujuan dari semiotika, semiotika menawarkan kerangka berpikir sekaligus metode analisis untuk menghindari hal tersebut terjadi (Barthes, dalam Wibowo, 2013).

Selain istilah *denotative* dan *connotative*, Barthes juga mengemukakan istilah “mitos” dalam model analisis semiotiknya. Mitos disini bukanlah mitos yang secara sama diartikan dengan mitos-mitos yang sebenarnya, meskipun mitos-mitos yang sebenarnya itu dapat masuk ke dalam konstruksi mitos yang dikemukakan oleh Barthes. Mitos oleh Barthes disini merupakan sebuah pemaknaan yang dikonstruksi oleh kondisi sosial di tengah individu yang mengartikan *signifier*, hal ini bisa merupakan kondisi sosial, politik, *culture*, maupun kondisi dari *inherent* individu tersebut, seperti ideologi.

Karena individu yang mengartikan penanda (*signifier*) hidup dalam kondisi sosial yang berbeda-beda, pemaknaan yang berbasis mitos sangatlah bersifat subjektif, hal inilah yang kemudian melahirkan istilah konotatif (*connotative*), karena pemaknaan yang bersifat *reall* (objektif), tidak bisa disatukan dengan pemaknaan yang

sifatnya subjektif dalam payung istilah *Signified*. Selain pemaknaan yang sifatnya subjektif, mitos juga memiliki periode waktu tertentu sesuai dengan berjalannya kondisi sosial.

“Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu” (Sobur, 2009).

Namun kebanyakan menghilangkan konstruksi pemaknaan yang mengacu pada kondisi sosial (mitos), tidak menghilang dalam artian menghilang begitu saja, namun lebih kepada digantikan oleh konstruksi pemaknaan yang lain. Sebagai pengandaian adalah makna konotatif dari pohon beringin. Dalam kondisi sosial masyarakat Indonesia yang dikelilingi logika mistika, pohon beringin dikonotasikan sebagai pohon angker, mistis, dan klenik. Namun ketika kondisi sosial masyarakat yang dikelilingi logika mistika beralih kepada logika yang mengedepankan *science*, dan rasionalitas, bisa saja terjadi pergeseran makna secara konotatif dari beringin yang tadinya dikonotasikan sebagai klenik, menjadi beringin yang dikonotasikan sebagai, pro lingkungan, lingkungan hidup yang nyaman, keseimbangan antara alam dan manusia, dll. Hal tersebut bisa saja terjadi dengan banyaknya kampanye pro lingkungan hidup sekaligus Feminisme yang santer menggaungkan tentang isu lingkungan hidup.

Pemaknaan konotatif pohon beringin yang dilekatkan dengan isu lingkungan hidup adalah karena karakteristik pohon beringin yang secara *science* lebih unggul dari jenis pohon lain, dalam hal produksi oksigen dan menjaga ketersediaan air tanah. Dari pengandaian tersebut kita bisa mengetahui, perubahan kondisi sosial masyarakat yang tadinya dikelilingi oleh logika mistika menjadi dikelilingi oleh *science* dan rasionalitas, akan menggeser

pemaknaan konotatif yang awalnya berbasis mistis, menjadi pemaknaan konotatif yang berbasis *science*.

2.8.3 Semiotika Dalam Film

Film merupakan sebuah sarana komunikasi yang memiliki unsur visual dan verbal, dimana kedua unsur tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam menyampaikan pesan. Pesan-pesan yang disampaikan pun bisa beragam, tergantung dari tujuan dibuatnya film tersebut. Dalam film, rangkaian gambar yang bergerak merupakan hal yang menjadi ciri khas, hal tersebut membedakan film dengan media komunikasi yang lain. Selain adanya unsur gambar yang bergerak, yang membedakan film dengan media komunikasi lain adalah, bagaimana cara film memberikan informasi kepada *audience*.

Film tidak secara langsung memberikan informasi (*to inform*) karena terdapat tuntutan menghibur dalam sebuah film (*to entertain*), hal ini menyebabkan harus adanya dua tujuan tersebut di dalam film, dalam artian film harus menghibur sekaligus memberikan informasi, hal tersebut membuat pesan utama dalam film tidak begitu saja dapat disampaikan secara langsung, melainkan harus dapat disampaikan secara menghibur.

Film memberikan informasi kepada *audience*, dengan cara membawa *audience* masuk ke dalam sebuah keadaan yang ada di dalam film (identifikasi psikologis), hal tersebut memberikan perubahan efek secara efektif kepada *audience*, dalam hal tersebut efek yang diberikan film dapat masuk pada tahapan kedua efek (afektif) tidak seperti media komunikasi lain yang bersifat *to inform* yang biasanya berhenti pada tahapan awal efek (kognitif).

Sebuah pesan yang dirangkai dalam sebuah produk *entertain*, akan berefek besar pada perubahan afektif dari *audience*, namun disisi lain, pesan-pesan yang sifatnya lebih kepada perubahan efek kognitif (*to inform*) hanya ditangkap sekilas, karena unsur *entertain* yang membungkus pesan tersebut. Hal ini menyebabkan film dimaknai hanya secara *explicit*, padahal sebuah film biasanya dapat dimaknai secara lebih mendalam.

Unsur-unsur visual dan verbal dalam film, seperti gambar yang ditampilkan, waktu, komposisi, dan warna, memiliki sebuah pesan yang ingin disampaikan, begitu juga dengan diksi, tokoh yang ditampilkan, intonasi dan unsur-unsur lainnya dari film, merupakan sebuah pesan juga, hal-hal yang berupa pesan tersebut, dikemas menjadi sebuah film, hal ini membuat pesan-pesan yang banyak tadi terkumpul menjadi satu, menjadi sebuah pesan yang bersifat kesimpulan, hal ini membuat pemaknaan terhadap film cenderung dangkal karena film dimaknai secara universal. Memaknai film, mengambil pesan-pesan dari film, bukan memaknai unsur-unsur di dalam film sebagai pesan, dimana akan lebih banyak pesan yang bisa ditangkap.

Semiotika merupakan cara yang dapat digunakan untuk memaknai film secara menyeluruh, karena semiotika dapat masuk ke dalam unsur visual maupun verbal dari film, dengan menggunakan semiotika, film dapat di signifikansi secara mendalam. Semiotika akan membedah unsur-unsur yang terdapat di dalam film, sebagai kumpulan pesan-pesan bukan sebagai pesan yang bersatu sebagai kesimpulan, kumpulan pesan-pesan tadi akan membuat kita memahami bagaimana kesimpulan pemaknaan dari film dapat terbentuk.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memahami permasalahan berdasarkan gejala-gejala yang ditampilkan dalam lingkup sosial masyarakat, penelitian ini memerlukan kepekaan dalam merasakan dan menerjemahkan kondisi sosial yang terjadi ditengah masyarakat. (John, 2016). Penelitian kualitatif juga dapat dijelaskan sebagai, sebuah penelitian untuk memahami makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, ataupun deskripsi dari sebuah fenomena (Muri, 2014).

“Penelitian ini akan dikemukakan secara deskriptif, artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Data pada umumnya berupa pencatatan, bukan dalam bentuk angka-angka.” (Semi, 2012), data di sini merupakan kalimat, berupa monolog maupun dialog, sekaligus gambar adegan yang ditampilkan dalam film dokumenter *Deutsche Welle* (DW) berjudul: Indonesia: *Diversity under threat* yang mengandung muatan terkait islam konservatif di Aceh.

3.2. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotika milik Roland Barthes, Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi,

dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes, 1988; Kurniawan, 2001; Sobur, 2009).

1. Signifier (Penanda)	2. Signified (Petanda)
3. Denotative Sign (Tanda Denotatif)	
4. Conotative Signifier	5. Connotative signified (Petanda Konotatif)
6. Connotative sign (Tanda Konotatif)	

Gambar 5. Peta Tanda Barthes

Sumber: (Sobur ,2009)

Peta di atas merupakan peta yang dibuat oleh Barthes, terkait bagaimana sistem signifikasi terjadi. Dalam terjadinya signifikasi oleh Barthes, Barthes membaginya menjadi dua tingkatan, tingkatan pertama merupakan tingkat pemaknaan pada level denotatif (*denotative*) untuk pemaknaan level kedua merupakan pemaknaan dalam level konotatif (*connotative*).

Berdasarkan tabel tersebut signifikasi dimulai dengan, penanda (*signifire*), *signifire* merupakan kenampakan yang terjadi dan terlihat indra yang memiliki muatan petanda (*Signified*) di dalamnya, lalu dari *signifire* masuk ke dalam bagian, *Signified*. *Signified* merupakan arti secara harfiah/arti secara *real* dari sebuah *signifire*, masuk pada tahapan ketiga, *Signified* yang sudah didapat dari signifikasi *signifire* berubah menjadi tanda denotatif (*Denotative Sign*), dengan begitu level pertama signifikasi telah berlalu.

Untuk level kedua signifikasi, tanda denotatif (*Denotative Sign*) dari signifikasi level pertama, menjadi penanda konotatif (*Connotative Signifier*), *Connotative Signifier* yang sama dengan *Denotative Sign*, di

signifikasi menjadi petanda konotatif (*Connotative signified*), untuk proses signifikasi disini, “mitos” terlibat, dimana tidak seperti signifikasi level pertama yang hanya dilakukan secara harfiah, signifikasi level kedua, dari *Connotative Signifier* menuju *Connotative signified* dilakukan dengan melihat aspek-aspek sosial budaya. Setelah didapat *Connotative signified* dari proses signifikasi tersebut, *Connotative signified* tersebut, bisa masuk ke dalam bagian akhir dari proses signifikasi yaitu menjadi tanda konotatif (*Connotative sign*).

Film dokumenter dalam objek penelitian, dapat dianalisis menggunakan metode ini karena memiliki unsur visual dan verbal di dalamnya, dimana unsur gambar atau visual merupakan unsur penting dalam ranah analisis semiotik, “Gambar-gambar dalam film memiliki persamaan dengan realitas. Sistem semiotika yang paling penting dalam film adalah silih bergantinya gambar yang menunjukkan gerakan” (Zoest, 1993; Apip, 2011).

Banyak film dokumenter yang dianalisis menggunakan metode analisis semiotik, hal ini karena gambar yang ditayangkan maupun penggunaan pilihan kalimat, merupakan unsur film yang lekat kaitanya dengan semiotika, hal tersebut karena gambar yang ditampilkan maupun kalimat yang digunakan, merupakan simbol-simbol yang memiliki makna. Hal ini membuat analisis semiotika tepat digunakan untuk menganalisis film dokumenter.

3.3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti merupakan film Dokumenter keluaran DW Documentary berjudul: *Indonesia: Diversity under threat*, film dokumenter ini berdurasi 42.25 (empat puluh dua menit, dua puluh lima detik) film ini diproduksi oleh Jörg Seibold dan di-*upload* di kanal youtube DW Documentary, pada tanggal 28 mei 2020.

3.4. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, berupa dialog maupun monolog, sekaligus beberapa *scene* yang terdapat dalam film dokumenter DW "Indonesia: Diversity under threat".
2. Data sekunder, berupa data yang didapat melalui studi kepustakaan berupa kutipan maupun informasi yang diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, arsip, berita dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik berikut:

1) Dokumentasi

Merupakan penghimpunan data-data terkait penelitian yang akan dilakukan, adapun data-data yang dikumpulkan dapat berbentuk banyak hal seperti surat kabar, dokumen dan sebagainya, dengan syarat berasal dari sebuah sumber yang terpercaya.

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan dialog maupun monolog, sekaligus beberapa *scen* yang dianggap merepresentasikan Islam konservatif yang terdapat dalam film dokumenter DW "Indonesia: Diversity under threat"

2) Studi pustaka

Dilakukan dengan menambah bahan penelitian seperti bacaan dan literatur, yang dapat digunakan untuk memperlancar proses penelitian, dalam hal ini bacaan dan literatur tersebut bisa digunakan sebagai pendukung dalam melakukan pengkajian

sekaligus referensi dalam melakukan proses penelitian. Untuk data yang digunakan harus berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian tanpa mengurangi unsur keilmiahan hasil dari penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber tersebut bisa berasal dari internet, buku, jurnal-jurnal ilmiah, maupun portal berita yang kredibel.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis Data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Secara lebih rinci, uraian ringkas mengenai langkah-langkah analisis semiotika oleh Kriyantono (2009) adalah sebagai berikut:

- a) Inventarisasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya baik dari dokumentasi maupun studi kepustakaan.
- b) Kategorisasi model semiotik, menentukan model semiotika yang digunakan, yaitu model semiotika Roland Barthes.
- c) Klasifikasi data, identifikasi teks (tanda), alasan-alasan tanda tersebut dipilih, dan tentukan kekhasan wacananya dengan mempertimbangkan elemen semiotika dalam scene yang dianggap sebagai representasi islam konservatif.
- d) Penentuan scene tersebut menentukan penanda (*signifer*), petanda (*signified*), makna denotasi dan makna konotasi.
- e) Analisis data untuk membahas makna konotasi tahap kedua (*connotative sign*) yang berdasarkan ideologi, interpretan kelompok, *framework*, budaya, aspek sosial, komunikatif, lapisan makna, kaitan

dengan tanda lain, hukum yang mengaturnya, serta berasal dari kamus.

- f) Penarikan kesimpulan, penilaian terhadap data-data yang ditemukan dibahas dan dianalisis selama penelitian.

Dari uraian diatas teknik analisis yang dipakai penulis yaitu:

- a) Menyaksikan film dokumenter Berjudul: Indonesia: Diversity Under Threat, Produksi Deutsche Welle (DW).
- b) Memilih model semiotika Roland Barthes, sebagai model semiotika yang akan digunakan.
- c) Melakukan pengamatan unsur visual maupun verbal dalam film, unsur visual dan verbal dipilih karena merupakan unsur utama film bergenre dokumenter.
- d) Mengambil bukti tangkapan visual dalam film sekaligus unsur verbal seperti monolog dialog ataupun narasi yang disampaikan dalam film, yang dianggap memiliki kaitan dengan representasi islam konservatif.
- e) Melakukan signifikasi tahap pertama, terhadap data unsur visual maupun verbal yang didapat di dalam film, untuk mendapatkan makna denotatif, lalu melakukan signifikasi tahap kedua untuk mendapatkan makna konotatif dengan melibatkan, aspek sosial, historis, hukum, culture, ideologi, serta bahasa, terkait data-data yang diperoleh yang dianggap mencerminkan representasi islam konservatif.
- f) Melakukan penarikan kesimpulan, terhadap hasil analisis data yang dilakukan terkait data yang ditemukan dalam proses penelitian.

3.7. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini teknik uji keabsahan yang peneliti gunakan adalah triangulasi data dan meningkatkan ketekunan, menurut Sugiyono (2008: 270) terdapat beberapa cara dalam melakukan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, antara lain validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, objektivitas, lalu triangulasi dan meningkatkan ketekunan. Triangulasi data sendiri dilanjutkan menurut Sugiyono (2008: 273) adalah pengecekan data dari banyak sumber yang berbeda baik dari segi metode maupun waktu. Pada penelitian ini triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi teori, dalam artian data yang peneliti gunakan berasal dari perbandingan banyak penelitian penelitian terdahulu, hal ini dilakukan guna menghasilkan data dari banyak sudut pandang teori, yang berfungsi untuk memperkecil bias di dalam penelitian.

Selain triangulasi data peneliti juga melakukan peningkatan ketekunan, dimana hal ini digunakan untuk meninjau banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun meningkatkan ketekunan menurut Sugiyono, (2008: 272) adalah membaca dan mencari macam macam data yang berkaitan dengan hasil perolehan penelitian, dimana data data ini dapat diperoleh dari fererensi yang bermacam macam, seperti jurnal hasil penelitian, buku maupun dokumentasi. dalam penelitian ini peningkatan ketekunan peneliti lakukan dengan cara membaca banyak literatur yang berhubungan dengan study media, semiotik barthes, konservatifme juga budaya aceh, dimana literatur literatur tersebut merupakan aspek penting untuk membangun konsep dari bagaimana penelitian dilakukan dan hasil apa yang akan diperoleh.

Selain itu peningkatan ketekunan juga tercermin dari berulang kalinya peneliti menonton dan mencatat adegan demi adegan di dalam film, hal ini dilakukan untuk menghasilkan data yang benar dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. pada bagian akhir peningkatan ketekunan juga digunakan

pada proses pengolahan data, dimana dalam proses tersebut ketelitian dan ketekunan peneliti merupakan hal yang penting, guna menghasilkan sebuah penelitian yang detail dan akurat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis semiotika terhadap film Indonesia: Diversity under threat besutan DW, kita bisa mengetahui bahwasannya islam di Aceh lebih khususnya pelaksanaan hukum syariat islam di Aceh. Dipandang sebagai sebuah sikap konservatif. Kita bisa melihat itu dari ditampilkannya oleh DW, kecenderungan kuat masyarakat Aceh terhadap nilai nilai yang mereka anut.

Terkait bagaimana islam konservatif ditampilkan, kita bisa melihatnya melalui tiga hal yang berbeda yaitu:

1. kecenderungan masyarakat Aceh untuk bertahan dalam status quo, yang dapat kita lihat dari antusias masyarakat Aceh dalam melihat prosesi hukum cambuk. Pandangan masyarakat Aceh yang ikut mendukung pelaksanaan hukum syariat di Aceh, dan pandangan terkait khilafah oleh Abi Wahid.
2. Usaha konkrit yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga nilai nilai tradisional mereka. Seperti adanya polisis syariat, juga prosesi hukum cambuk yang dilegalkan secara hukum.
3. Kecenderungan dalam menolak nilai nilai yang berasal dari luar. Seperti penolakan keras terhadap LGBT, terorisme yang dilekatkan dengan anti barat dan demokrasi. Ketidak terbukaannya masyarakat Aceh dengan nilai nilai dari luar juga dapat kita lihat dari tidak digubrisnya kritikan kritis terkait dengan pelaksanaan hukum syariat di Aceh.

5.2 Saran

1. Peneliti berharap para penonton film dokumenter sadar, bahwasannya film dokumenter dapat digunakan untuk mentransfer kepentingan, karenanya penulis mengharapkan penonton film dokumenter untuk melihat film bukan hanya sebagai sebuah hiburan, tapi juga sebagai sebuah pesan sekaligus media.
2. Peneliti mengharapkan peneliti lain yang memiliki tema sama yaitu semiotik untuk menggunakan banyak referensi di dalam melakukan signifikasi, hal ini dikarenakan penelitian semiotika harus ditunjang dengan penelitian-penelitian lain, dimana bacaan dan pengetahuan dari banyak bacaan tersebutlah yang menjadi penentu pada baik tidaknya sebuah penelitian semiotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agnes, Setyowati H. 2017. *IDEOLOGI ISLAM, BARAT, DAN AMERIKA; Potret Sejarah Global Kepentingan dalam Pertarungan Diskursif*. Yogyakarta: Suluh Media
- Alex Sobur. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amir Piliang, Yasraf. 2003. *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studie Atas Matinya Makna*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Azhar, Arsyad. 2005. *Media Pembelajaran, cet.6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chomsky Noam. 1997. *Media Control: The Spectacular Achievements Of Propaganda*. New Yorks: Seven Stories Press
- _____. 2017. *Pirates And Emperors: Pelaku Teroris Internasional Sesungguhnya*. Yogyakarta: Penerbit Bentang
- Chomsky Noam and Barsamian David. 2015. *Propaganda And The Public Mind*. Chicago: Haymarket Books
- Eryanto. 2005. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- John, W. Creswell. 2016. *Reserc Design: Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran, Keempat*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Kristeva, N. S. S. (2015). *Sejarah Ideologi Dunia*. Lentera Kreasindo.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Munir. 2012. *Multimedia : Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

- Muri, Yusuf. 2014. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Pease, Allan. 2004. *Bahasa Tubuh. (Sudarmadji)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritzer George, Goodman J Douglas. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Said, Edward W. 2002. *Covering Islam*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Semi, Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Sulaiman. 2018. *Studi Syariat Islam di Aceh. Banda aceh*: Madani Publisher.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Indiwani. Seto. Wahyu. 2013. *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Skripsi komunikasi*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Abdullah, I. T. (2000). Ulama dan Hikayat Perang Sabil dalam Perang B Landa di Aceh. *Humaniora*, 12(3), 239-252.
- Affandi, N. I. (2021). Kontroversi pemakaian jilbab pada anak di Youtube DW Indonesia: analisis wacana kritis Sara Mills (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Aguswandi, Say No To Conservative Islam, dalam *The Jakarta Post*, August 30,2006
- Aked, H., Jones, M., & Miller, D. (2019). Islamophobia in Europe: *How governments are enabling the far-right 'counter-jihad' movement*.
- Al Muiz, M. N., & Miftah, M. (2020). Pendekatan Konservatif dalam Pendidikan Islam (Kajian Teori Al Muhafidz Al-Ghazâli dalam Pendidikan Islam). *Jurnal Penelitian*, 14(1), 49-76.
- Amin, K. (2018). ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 221-232.
- Anam, M. N. (2016). Makna Foto Jurnalistik Pada Peristiwa Meletusnya Gunung Sinabung (Analisis Semiotik Pada Bulan Juni 2015 di www. Tribunnews.com) (*Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*).

- Angelina, A. M., Abidin, Z., & Karyadi, F. Y. (2018). Film Fiksi Tuan X: Pendekatan Gestur sebagai Penanda Psikologi Tokoh Utama. *Capture: Jurnal Seni Media Rekam*, 10(1), 14-26.
- Anwas, O. M. (2010). Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan Dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, 16(9), 256-266.
- Apip, A. (2011). Representasi Mitos dalam Film Dokumenter. *Panggung*, 21(1).
- Assyaukanie, L. (2018). Akar-Akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia. *MAARIF*, 13(2), 27-42.
- Barida, M. (2017). Inklusivitas Vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dalam Mewujudkan Kedamaian Yang Hakiki Bagi Masyarakat Indonesia. *The 5th Urecol Proceeding*, 1403-1409.
- Bilous, O. M., Semeniuk, O. A., Mychyda, S. P., & Bilous, O. I. (2019). Deutsche Welle” As A Mass Media Language For Specialist Purposes: Pragmatics, Analysis, And Translation. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 176-181.
- Bramasto, I. L. (2006). Autisme Dalam Film Biola Tak Berdawai (Analisis Semiotik Pada Film Biola Tak Berdawai Karya Sekar Ayu Asmara) (*Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*).
- Chalk, P. (2015). Black flag rising.
- Chinitz, J. (2007). The Role of the Shoe in the Bible. *Jewish Bible Quarterly*, 35(1), 41.
- Desak Putu, Y. A. T. Y. (2019). Pemanfaatan Film Dokumenter The Cove Sebagai Media Kampanye Penyelamatan Lumba. *Gorga Jurnal Seni Rupa*, 8(02).
- Diana, N., & Nurjana, N. (2020). Pesan Dakwah Dalam Adat Peutron Aneuk. Al Munir: *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 39-47.
- Diani, A., Lestari, M. T., & Maulana, S. (2017). Representasi Feminisme Dalam Film Maleficent. *ProTVF*, 1(2), 139-150.
- Dja'far, A. B. (2018). Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Hukum JinĀyĀt Di Aceh. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 1(1), 1-32.
- Fanning, R. (1928). Silhouettes

- Fardila, I. (2020). Penciptaan Film Baban Gala: Representasi Ekspresi Personal Sebagai Panghulu Di Minangkabau. *Melayu Arts And Performance Journal*, 3(1), 62-73.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Hasibuan, H. (2021). Presentasi diri da'i dalam berdakwah di Yayasan Baitul Yusufiyah Al-Ridwaniyah Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais (*Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan*).
- Iskandar, M. (2017). HAM Dalam Prespektif Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19(1), 111-126.
- Ismail, M. T. (2011). Konservatisme Dalam Politik UMNO. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, 38, 57-80.
- Juliani, R. (2018). Pemberitaan Media Asing Mengenai Hukum Cambuk Gay Di Aceh. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Mahadika, F., & Sardini, N. H. (2019). Radikalisasi Isu Agama Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 131-140.
- Mudjiono, Y. (2020). Kajian Semiotika Dalam Film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 125-138.
- Muhsinah, M., & Sulaiman, S. (2019). Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 43(2), 202-221.
- Nasir, M. (2013). Syariat Islam dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 37(1).
- Nur, H. B. M., Mohamed, S. S. B. P., & Rambely, N. A. S. (2021). Hubungan Sosial Mayoritas Islam Dengan Minoritas Agama-Agama Lain Di Kota Banda Aceh-Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2).
- Nurmala, F., Iriansyah, H. S., & Putra, N. L. J. (2020). Peningkatan Pemahaman Materi Keberagaman Suku Bangsa, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia Melalui Model Think Pair Share Berbantuan Media Audio-Visual. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara Jakarta*, 11(2), 172-180.
- Pabyantara SM, D., Wibowo, P., & Zamzamy, A. (2018). Terorisme di Indonesia: Antara Kepentingan Politik Negara dan Permasalahan Ontologis. *Global and Policy Journal of International Relations*, 6(02).

- Prastomo, A. D. (2016). Visual Look Karakter Mgr. Soegijapranata dalam Film Soegija. *Visual Look Karakter Mgr. Soegijapranata dalam Film Soegija*, 3(1), 27-39.
- Prawitasari, J. E. (1995). Mengenal emosi melalui komunikasi nonverbal. *Buletin Psikologi*, 3(1), 27-43.
- Putra, Y. H. (2013). Analisis Framing Pemberitaan Tentang Front Pembela Islam Pada Kompas. Com Dan Voice Of Al Islam Periode Januari-April 2012 (*Doctoral dissertation*, UPN" Veteran" Yogyakarta).
- Ramadhan, D. A., Ronald, R. O., & Sn, S. (2018). Director Of Photography Pada Film Dokumenter Sesajen Kersa Nyai Dalam Kebudayaan Sunda Di Masyarakat Adat Kampung Cireundeu. DIKA ADI RAMADHAN 106020018 (*Doctoral dissertation, Fotografi & Film*).
- Rosidi, R. (2016). Inklusivitas Pemikiran Keagamaan Abdurrahman Wahid. *KALAM*, 10(2), 445-468.
- Sadewa, G. P. (2019). Rangkaian close-up, ekspresi visual ritual tiban: Wujud Pengorbanan dalam Film Eksperimental (*Doctoral dissertation, ISI Yogyakarta*).
- Saifullah, S. (2020). Perbedaan Antara Hukum Pidana Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1), 85-109.
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220.
- Sayogo, D. (2017). Kajian Identitas Visual Video Travel Pariwisata Indonesia" Wonderfull Indonesia: A Visual Journey" Yang Memicu Reaksi Youtuber Mancanegara. *AKSA: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 1(1), 001-016.
- Sutanto, M. H. (2014). Propaganda politik calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019 (analisis isi berita kampanye pemilihan Presiden tahun 2014 pada Harian KOMPAS edisi 4 Juni sampai 5 Juli 2014). *Jurnal Humanity*, 9(2)
- Siswati, E. (2015). Representasi domestikasi perempuan dalam iklan.
- Suwarno, S. (2014). Representasi Makna Visual Poster Film Religius (StudiSemiotika Poster Charles S. Pierce Pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa). *Communication*, 5(2)..
- Taranita, A. G. (2017). Citra Perempuan Dalam Film Komedi (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film" Comic 8: Casino King Part I" Karya

Anggy Umbara) (*Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*).

Utami, C. D. (2010). Film Dokumenter Sebagai Media Pelestari Tradisi. *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya*, 2(1).

Wahid, D. (2014). Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 21(2), 375-390.

Widinarsih, Dini. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia*, 20(2), 127-142.

Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Refleksi Kritis Ideologi Pendidikan Konservatisme dan Liberalisme Menuju Paradigma Baru Pendidikan. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(4), 283-291.

Yasir. 2012. Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*; Vol 1, No 01 (2012)

Zakiyuddin, A. (2018). Teknik Teknik Propaganda Politik Jalaludin Rakhmat. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 39-58.

Internet dan Sumber Lain

Widhana, D., H. 2017. *Sejak 2010, Polisi Menjadi Target Serangan Teroris*. <https://tirto.id/cpqq>. Diakses pada 11 Januari 2022.

DW. 2015. *Made For Minds. - DW's New Slogan*. <https://www.dw.com/en/made-for-minds-dws-new-slogan/a-18403925>. Diakses pada 21 Oktober 2021.

DW. 2020. *Unbiased Information For Free Minds*. <https://www.dw.com/en/unbiased-information-for-free-minds/a-52364943>. Diakses pada 24 Juni 2021.

DW. 2021. *DW's Netiquette Policy*. <https://www.dw.com/en/dw-netiquette-policy/a-5300954>. Diakses pada 21 Oktober 2021.

DW Documentary. 2020. *Indonesia: Diversity under threat | DW Documentary*. <https://www.youtube.com/watch?v=pD58Dj648gM&t=3s>. Diakses pada 24 Juni 2021.

IPU Parline. 2022. *Monthly ranking of women in national parliaments*. <https://data.ipu.org/women-ranking?month=9&year=2021>. Diakses pada 11 Januari 2022.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. *45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>. Diakses pada 13 oktober 2020.
- The Social Progress Imperative. 2017. *2017 Social Progress Index Executive Summary*.
- The Social Progress Imperative. 2018. *2018 Social Progress Index Executive Summary*.
- The Social Progress Imperative. 2018. *How We Support The Sustainable Development Goals*. <https://www.socialprogress.org/about-us/sdgs>. Diakses pada 13 oktober 2020.
- The Social Progress Imperative. 2019. *2019 Social Progress Index Executive Summary*.
- The Social Progress Imperative. 2020. *2020 Social Progress Index Executive Summary*.
- The Social Progress Imperative. Tanpa tahun. *Explore the 2020 Social Progress Index Map*. <https://www.socialprogress.org/?tab=3&data=OPP-INC&compare=IDN>. Diakses pada 24 Juni 2021.
- United Nations. Tanpa tahun. *The 17 Goals*. <https://sdgs.un.org/goals>. Diakses pada 21 Oktober 2021.